

**KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN
ACEH (STUDI KASUS KABUPATEN BIREUEN)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Maghfirah Alwi

NIM. 160801052

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maghfirah Alwi
NIM : 160801052
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Konsep Gender Dalam Perspektif Perempuan Aceh (Studi Kasus Kabupaten Bireuen)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 11 Januari 2022

MaghfirahAlwi



KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN ACEH

(Studi Kasus Kabupaten Bireuen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

MAGHFIRAH ALWI

NIM. 160801052


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I - RANIRY Pembimbing II


Dr. Ade Irma, B. H. Sc., M.A.

NIP. 197309212000032004


Rizkika Lhena Darwin, M.A.

NIP. 198812072018032001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik


Diajukan Oleh :
Magfirah Alwi
NIM.160801052

Pada Hari / Tanggal
Rabu : 13 Januari 2022
11 Jumadil Akhir 1443

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris



Ade Irma, B.H., Sc., M.A
NIP. 197309212000032004


Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP.198812072018032001

Penguji I

Penguji II


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002


Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc., M.PM
NIDN. 2007017903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry


Darussalam – Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi S.Ag., M.Hum.
NIP.197809172009121006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin segala puji berangkaikan syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kesehatan, serta kesempatan kepada peneliti atas berkah dan karunianya pula peneliti telah dapat merampungkan skripsi yang mengupas tentang **“KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN ACEH (Studi Kasus Kabupaten Bireuen)”**. Skripsi ini penulis ajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya Shalawat dan salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala serta hambatan. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari ada begitu banyak kekurangan di dalam skripsi ini, sehingga penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun, agar penulis bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umum.

ABSTRAK

Nama : Maghfirah Alwi
NIM : 160801052
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul : Konsep Gender Dalam Perspektif Perempuan Aceh (Studi Kasus Kabupaten Bireuen)
Tanggal Sidang :-
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
Pembimbing II : Rizkika Lhena Darwin, M.A.
Kata Kunci : *Konsep Gender, Perspektif, Perempuan*

Pada abad XIX perempuan mulai memfokuskan diri dalam pergerakan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Karena pada saat itu perempuan di Indonesia terkekang oleh budaya yang membuat mereka tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi seperti kaum lelaki. Munculnya gender di Indonesia berawal dari budaya kuat yang menganggap perempuan hanya sebagai *the second sex* untuk membantu laki-laki. Karena itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, kajian ini bertujuan untuk mengetahui awal mula munculnya gender dan bagaimana konsep gender tersebut di dalam pandangan perempuan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan berbeda mengenai konsep gender di kalangan perempuan itu sendiri. Sehingga, adanya dua perspektif berbeda ini kemudian membentuk dua kelompok tentang pemaknaan konsep gender yang terdiri dari kelompok yang mendukung adanya kesetaraan serta diperbolehkannya perempuan untuk menjadi pemimpin dan kelompok yang tidak setuju dengan kesetaraan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Gender.....	6
2.1.2 Feminisme.....	7
2.2 Literatur Review.....	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1 Pendekatan Penelitian	10
3.2 Focus Penelitian	10
3.3 Lokasi penelitian	10
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	11
3.4.1 Sumber Data Primer.....	11
3.4.2 Data Sekunder	11
3.5 Informan Penelitian.....	12
3.6 Teknik pengumpulan data.....	12
3.6.1 Studi Kepustakaan.....	12
3.6.2 Dokumentasi	12

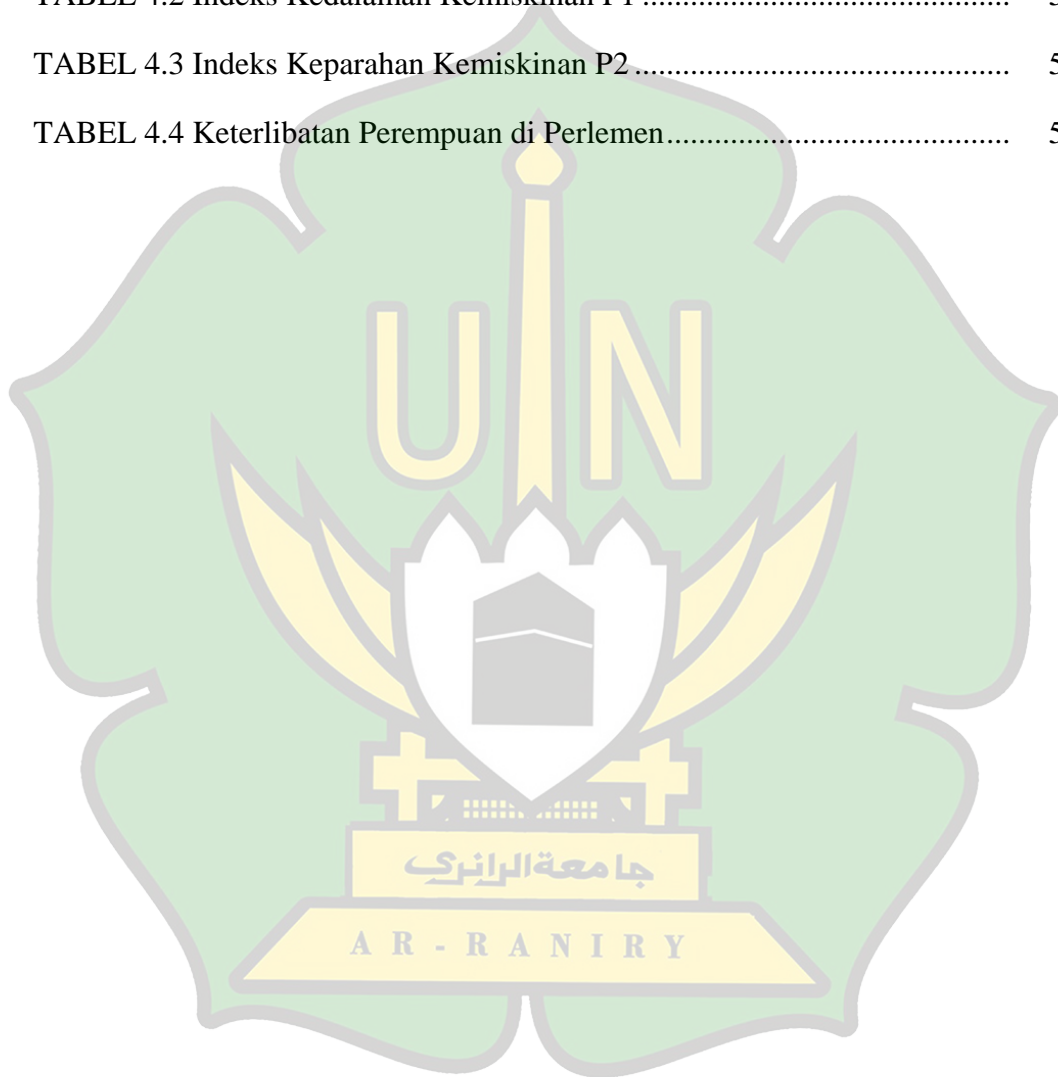
3.6.3	Wawancara.....	13
3.6.4	Observasi	13
	3.7 Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	13
3.7.1	Kredibilitas.....	13
3.7.2	Transferabilitas	13
3.7.3	Dependabilitas.....	13
3.7.4	Konfirmabilitas	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		16
4.1	Kabupaten Bireuen: Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial dan Kondisi Politik.....	16
4.1.1	Kondisi Ekonomi	17
4.1.1.1	Kemiskinan.....	21
4.1.1.2	Tingkat Penganggungan	24
4.1.2	Kondisi Sosial	26
4.1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	27
4.1.2.2	Indeks Demokrasi.....	29
4.1.2.3	Indeks Pembangunan Gender	30
4.1.2.4	Gender dan Pendidikan.....	32
4.1.2.5	Gender dan Pekerjaan.....	36
4.1.3	Kondisi Politik	40
4.2	Konsep Gender Dalam Perspektif Perempuan Aceh.....	42
4.3	Faktor Yang Membentuk Perspektif Perempuan Aceh	58
4.3.1	Faktor Agama dan Patriarki	58
4.3.2	Faktor Pendidikan	59
4.3.3	Faktor Ekonomi.....	59
4.3.4	Faktor Sosial Politik.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	64



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Jumlah Informan Penelitian	13
TABEL 4.1 Kependudukan Kabupaten Bireuen	48
TABEL 4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	54
TABEL 4.3 Indeks Keparahan Kemiskinan P2	54
TABEL 4.4 Keterlibatan Perempuan di Perlemen.....	56



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bireuen	22
GAMBAR 4.2 Jenjang Pendidikan.....	51



DAFTAR BAGAN

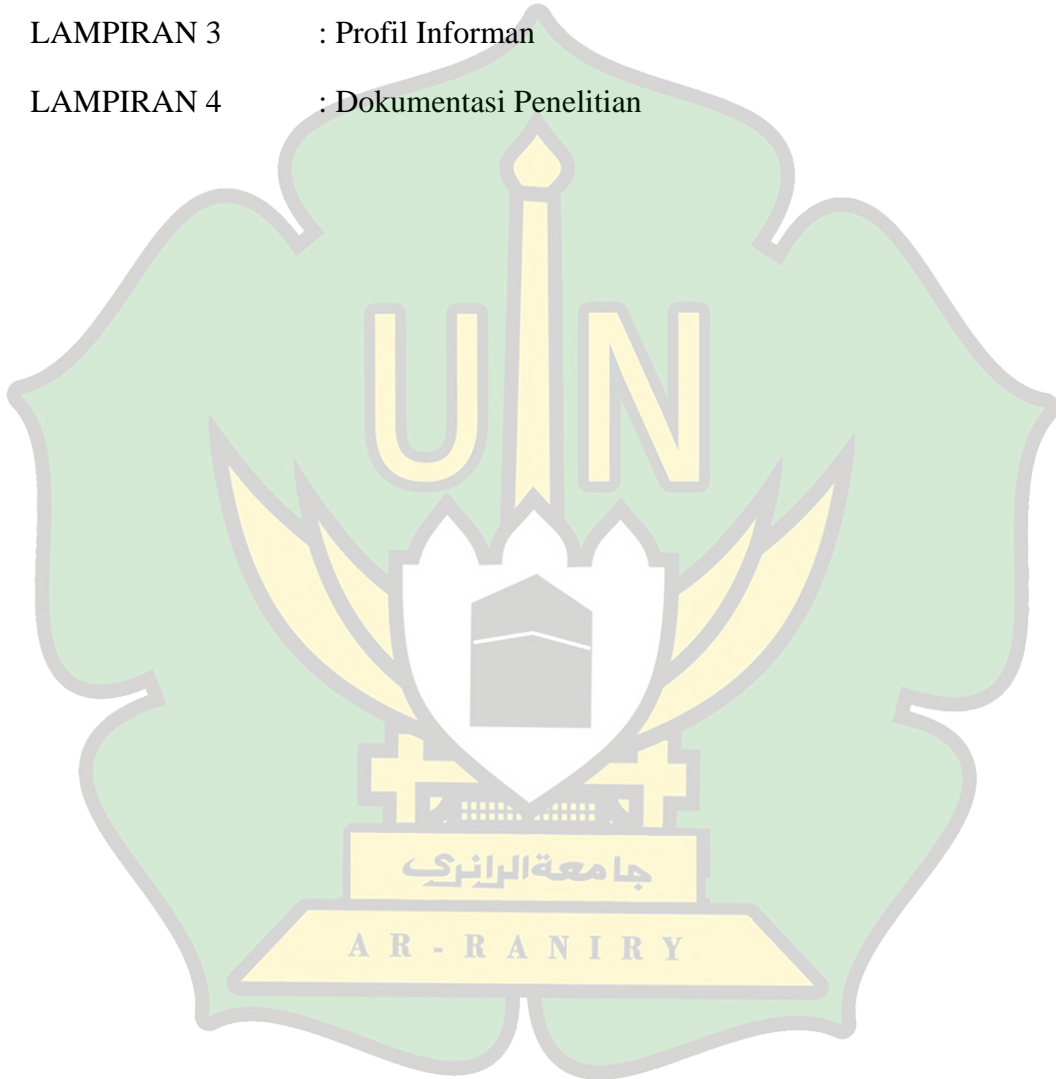
BAGAN 4.1 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bireuen Tahun 2014-2019.....50

BAGAN 4.2 Tingkat Pendidikan Informan Kec. Jeunib dan Kec. Jeumpa.....52



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Biografi Penulis
LAMPIRAN 2 : Instrumen Penelitian
LAMPIRAN 3 : Profil Informan
LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini, ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Sehingga praktik tersebut menyebabkan berbagai permasalahan sosial di Indonesia.¹

Timbulnya sebuah pergerakan biasanya didasari dari semangat kuat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih adil. Sama halnya dengan kesetaraan gender, di mana pergerakan perubahan dari perempuan di Indonesia yang mengarah pada kebangkitan gerakan perempuan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki tatanan pemerintahan yang jauh lebih baik sekaligus kultur masyarakat yang cukup kondusif yang menciptakan ketimpangan terhadap perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki.²

Indonesia Pada abad XIX perempuan memfokuskan diri dalam pergerakan kesetaraan dalam dunia Pendidikan. Karena pada saat itu perempuan di Indonesia terkekang oleh budaya yang membuat mereka tidak bisa merajut pendidikan tinggi seperti laki-laki. Munculnya gender di Indonesia berawal dari adanya budaya kuat yang mengikat perempuan pada waktu itu. Pada saat itu perempuan

¹ Ade dan Dessy. *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*. Universitas Padjajaran: Bandung. *Jurnal Sosial*. Vol.7. No. 1. Hal.72.

² <https://indoprogress.com/2017/12/gerakan-perempuan-di-indonesia-pasang-surut-memperjuangkan-hak/>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

hanya dianggap sebagai *the second sex* untuk membantu kaum laki-laki saja. Hal ini menjadi pemicu yang mendorong kaum perempuan untuk melakukan pemberontakan terhadap budaya tersebut.³

Pergerakan perubahan dalam gender bukan hanya berpengaruh di Indonesia saja, pergerakan tersebut juga berpengaruh ke daerah-daerah bagian Indonesia, Aceh salah satunya. Dalam bangsa Indonesia, relasi gender yang ada di Aceh sangat kuat dengan nilai Islam. Dalam Islam ada beberapa pertentangan yang mengatakan bahwa Islam melindungi setiap perempuan serta memberikan kebebasan. Namun, pada satu sisi sebuah kelompok aktivis perempuan yang dikenal sebagai *duek pakat inong Aceh* pada Februari 2000 mengatakan bahwa, prinsip yang mengandung kebenaran dalam islam adalah sebuah kebencian dari seorang pria terhadap perempuan yang menjadi masalah serius bagi perempuan dalam pergerakan Islam.⁴

Orde baru pada masa lalu yang telah menghancurkan banyak keluarga Di Aceh yang egaliter telah memberi peluang besar kepada kaum perempuan untuk bisa bergerak bebas, sehingga Aceh bisa memiliki perempuan sultanah. Dulu para elit pemerintahan menyetujui pembentukan PKK dan Panca Dharma wanita pada masa orde baru karena ini menjadi sebuah mekanisme control terhadap perempuan, dimana mereka tau bahwa perempuan di Aceh sejak dulu sudah menjadi pejuang dan memiliki sejarah pemberontakan pada masalalu.⁵

³ Syahrul Amar. *Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX*. Universitas Hamzawadi. Vol.1. No.2. 2017. Hal. 106-111.

⁴ Jacqueline Aquino Siapno. 2002. *Gender, Islam, Nasionalism and The State in Aceh*. Routledge Curzon 11 New Fetter Lane: London.

⁵ Mustaghfiroh Rahayu. 2013. *Reading on Acehnese Woman in The Age of Sharia*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Seiring berjalannya waktu, banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi pada kaum perempuan. Pola pikir antara perempuan yang ada dikota sangat berbeda dengan perempuan yang tinggal di daerah perkampungan. Dalam konteks masyarakat yang hidup di perkampungan, mereka tidak pernah merasa tidak adil ketika mereka dinikahkan saat selesai mengenyam Pendidikan di bangku SMA bahkan ada beberapa perempuan yang sudah menikah pada saat selesai menyemam pendidikan dibangku SMP. Di daerah perkampungan sendiri, hal ini bukan menjadi hal yang tabu. Berbanding terbalik dengan kaum perempuan yang telah hijrah dari kampung ke kota, pola pikir perempuan yang ada dikota berbeda dengan dikampung, mereka mengatakan bahwa menikah pada usia yang masih terhitung belia sangatlah tidak adil. Bahkan kaum perempuan yang ada di kota, sangat menjunjung tinggi pendidikan, mereka lebih memilih pendidikan terlebih dahulu, mapan dalam artian mempunyai penghasilan sendiri atau menjadi wanita karir barulah mereka bebas akan menikah atau tidak.⁶

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari masih ajegnya budaya patriaki yang masih melekat sebagai pola pikir sampai menjadi penyebab. Hal ini akibat dari budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan.⁷ Dalam dunia pemerintahan yang ada di Aceh, ruang lingkup ini masih didominasi oleh kaum laki-laki.

⁶ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. 2015. *Perempuan Aceh Dalam Perspektif Antropologi*. Vol. 1. No. 2. Hal. 38-42.

⁷ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*. Sosial Work Jurnal. Vol. 7. No. 1. Hal. 73.

Hal ini terjadi akibat adanya dominasi dari laki-laki yang sangat terlihat karena budaya patriarki masih sangat besar dan menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak yang lemah⁸.

Semua manusia memiliki hak serta kewajiban masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan harusnya memiliki akses yang sama dalam hal memperoleh kerja, pendidikan, mengambil keputusan, bergabung dalam politik dan lain sebagainya. Namun, terjadi ketimpangan gender akibat dari masih kentalnya pandangan dalam budaya masyarakat kita terhadap perempuan dan laki-laki. Hakikat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat luas, tentang peranan kedudukan laki-laki dan perempuan didalam realitas sosial mereka. Bahkan, di dalam Islam saja di ajarkan bahwa perempuan hakikatnya adalah orang yang duduk dirumah dengan keseharian sebagai ibu rumah tangga saja, sedangkan laki-laki adalah seorang pemimpin bebas untuk bekerja diluar serta pulang kapan saja dan bahkan laki-laki memiliki hak yang besar di atas perempuan.⁹

Berdasarkan pada hasil pemaparan data di atas, dugaan peneliti bahwa adanya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya Kabupaten Bireuen dapat mempengaruhi cara pandang perempuan di Aceh terhadap konsep gender.

⁸ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*. Sosial Work Jurnal. Vol. 7. No. 1. Hal. 73.

⁹ Kementerian Pemberdaya Perempuan RI. *Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Agama Islam*, (Jakarta: UNFPA, 2004). Hal. 117.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan susunan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep gender dalam perspektif perempuan Aceh?
2. Apa yang menyebabkan terbentuknya perspektif perempuan Aceh terhadap konsep gender?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai konsep gender dalam pandangan perempuan di Aceh itu sendiri. Serta memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai penyebab munculnya perspektif tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswi atau mahasiswa di jurusan Ilmu Politik sekaligus sebagai bahan bacaan untuk Fakultas FISIP UIN Ar-raniry. Dan penulis juga berharap semoga penelitian ini menjadi salah satu bahan bacaan yang memberikan banyak manfaat kepada pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Gender

Gender adalah cara di mana praktik sosial diatur, dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari gender sering dikaitkan dengan arena reproduksi¹⁰. Dengan kata lain gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku ataupun berpikir. Misalnya, pandangan bahwa perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sensitif, emosional, selalu memakai perhiasan. Sebaliknya, seorang laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, tegas dan sebagainya¹¹.

Menurut Nassarudin Umar, konsep gender adalah konsep dimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat biologis dan normatif melainkan melihat pada kualitas serta skill berdasarkan konvensi-konvensi sosial.¹²

Menurut Joan Scott, ia melihat gender tidak hanya sebagai element konstitutif dari hubungan sosial yang didasarkan atas perbedaan yang dirasakan antara jenis

¹⁰ R.w. Connell. *New Direction In Gender Theory Masculinity Research, and Gender Politics*. Journal of Anthropologi. University of Sidney: Australia. Vol. 61:3-4. 1996. Hal. 159.

¹¹ Maslamah dan Suprpti Muzani. *Konsep-konsep Tentang Gender Perspektif Islam*. Vol. 9. No.2. 2014.

¹² Nur Aisyah. *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)*. Muwazah. Vol. 5. No. 2. Hal. 206.

kelamin, tetapi juga sebagai cara utama untuk menandakan kekuasaan. Berbanding terbalik dengan penjelasan Terrel Carver dimana ia menjelaskan gender sering kali dipandang sangat tidak membantu sebagai identik secara longgar dengan “seks” dan lebih identik dengan wanita. Menurut Connel di antara literatur barat tradisional yang sangat besar tentang negara yang muncul dari liberalisme dan marxisme, hubungan gender tidak ditampilkan secara eksplisit sebagai bagian dari analisis meskipun asumsi implisit tentang gender yang menjadi fondasinya.¹³

Dalam konteks peran gender, perubahan pada struktur dapat dilihat dari peran yang dimainkan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian kerja dan status. Oleh karena itu, perempuan selalu ditempatkan pada bagian minoritas dan laki-laki pada bagian yang lebih dominan.¹⁴

2.1.2 Feminisme

Feminisme muncul akibat adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat sehingga timbul kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidakseimbangan tersebut. Pada dasarnya feminisme merupakan sebuah bentuk implementasi dari kesadaran untuk menciptakan keadilan gender dalam kerangka demokrasi dan juga HAM. Mary Wollstonecraft berpendapat bahwasanya wanita harus memiliki hak yang sama dengan pria¹⁵

¹³ Vicky dan Georgina. *Gender, Politic and The State*. Routledge 11 New Fetter Lane: London. 1998. Hal. 1.

¹⁴ Nur Aisyah. *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)*. Muwazah. Vol. 5. No. 2. Hal. 209.

¹⁵ Nuril Hidayati. *Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri: Kediri. Hal.23

Feminisme rasionalis sebagian besar mengatakan bahwa negara adalah aktor sentral yang mendefinisikan hubungan internasional, baik secara praktik empiris maupun sebagai disiplin, dan negara dapat diperlakukan sebagai aktor utilitarian yang peduli dengan kelangsungan hidupnya sendiri.¹⁶

Linda Gordon mengatakan bahwa feminisme sebagai suatu analisis terhadap perempuan untuk dijadikan tujuan mencari tahu bagaimana mengubahnya. Selain itu Gordon berpendapat bahwa feminisme juga berarti sebagai kritik atas supremasi laki-laki yang dirupakan dan ditawarkan dalam cahaya kehendak untuk merubahnya.¹⁷

2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, ada beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan judul penelitian ini yaitu “Konsep Gender Dalam Perspektif Perempuan Aceh”. Hasil kajian sebelumnya dilakukan oleh:

James T. Siegel dengan judul “The Rope of God” membahas mengenai sejarah Aceh dari kebangkitan keagamaan pada tahun 1930-an, masa kejayaan Iskandar Muda yang saat itu mencapai kebesaran politik, perang Aceh dan juga posisi *Uleebalang*.¹⁸

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Jacqueline Aquino Siapno dengan judul “Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh”, dalam penelitian ini secara

¹⁶ Laura. J. Shepherd. 2010. *Gender Mattern in Global Politics*. Roudledge: New York. Hal. 19-21.

¹⁷ Puji Lestari. 2016. *Feminisme Sebagai Teori dan Gerakan Sosial di Indonesia*. Hal. 4-5.

¹⁸ James T. Siegel. 1969. *The Rope of God*. University of California Press, Ltd : London.

garis besar membahas tentang kekuasaan, sejarah dan politik di Aceh dalam keadaan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu terdapat pembahasan mengenai hubungan gender di Aceh serta bagaimana situasi perempuan di wilayah konflik bersenjata.¹⁹

Rasyidin, dengan judul penelitian “Politik Gender Aceh: Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bagaimana kondisi politik gender di Aceh baik sebelum maupun sesudah MoU Helsinki. Menurutnya politik gender di Aceh masih belum mendapatkan perhatian yang optimal dan masyarakat belum sepenuhnya memahami apa itu politik gender.²⁰

Siti Aisyah, dengan judul penelitian “Peran Perempuan Dalam Masyarakat di Aceh (Studi Kasus Terhadap Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Ar-raniry Banda Aceh)”. Kesimpulan dari penelitiannya adalah perempuan memiliki beberapa peran yang dikelompokkan dalam beberapa ranah. Pertama, peran perempuan dalam ranah domestik yaitu sebagai kepala rumah tangga dan peran sebagai ibu dari anak-anaknya. Kedua, peran perempuan dalam ranah publik sebagai anggota masyarakat dan sebagai pekerja. Selain itu, dalam penelitiannya ia menjelaskan mengenai upaya Pusat Studi Wanita untuk mencapai kesetaraan gender.²¹

¹⁹ Jacqueline Aquino Siapno. 2002. *Gender, Islam, Nasionalism and The State in Aceh*. Routledge Curzon 11 New Fetter Lane: London.

²⁰ Rasyidin. *Politik Gender Aceh: Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki*. Unimal Press: Keude Aceh Lhoksemawe. Hal. 90-106.

²¹ Siti Aisyah. 2018. *Peran Perempuan Dalam Masyarakat di Aceh: Studi Kasus Terhadap Pandangan Aktifis Pusat Studi Wanita UIN Ar-raniry Banda Aceh*. UIN Ar-raniry Banda Aceh. Hal. 54-85.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Desi Purnamasari dengan judul “Gender Dalam Perspektif Ulama di Aceh (Studi Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan”. Desi Purnamasari dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana pandangan ulama terhadap konsep gender di Aceh Selatan. Hasilnya, sebagian ulama menerima konsep gender tersebut dan beranggapan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bekerja dimana pun. Dan sebagian ulama lainnya tidak menyetujui konsep gender.²²

Penelitian dilakukan oleh Kasmawati dengan judul “Gender Dalam Perspektif Islam”, dalam penelitian yang dilakukan oleh kasmawati secara garis besar menjelaskan pandangan agama Islam mengenai gender serta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang sesuai kodratnya.²³

Dari berbagai penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah konsep gender dalam perspektif perempuan di Aceh pada Kabupaten Bireuen. serta penelitian ini ingin melihat faktor dari terbentuknya perspektif perempuan terhadap konsep gender.

²² Desi Purnama Sari. *Gender Dalam Perspektif Ulama di Aceh (Studi kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan*. Al-Murshalah. Vol.2. No. 1. 2006. Hal. 56-61.

²³ Kasmawati. *Gender Dalam Perspektif Islam*. UIN Alauddin. Vol.1. No. 1. 2013. Hal. 59-61.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun langsung kelapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek kecenderungan, perhitungan non numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, dan story.²⁴

3.2 Focus Penelitian

Fokus penelitian yang akan saya teliti tentang, Konsep Gender Dalam Perspektif Perempuan Aceh (Studi Kasus Kabupaten Bireuen).

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian guna memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.²⁵ Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kabupaten Bireuen, di dua kecamatan yaitu kecamatan Jeunieb dan kecamatan Jeumpa. Pada Kecamatan Jeumpa peneliti memilih Desa Mon Mane dan Desa Geulumpang Payong sebagai lokasi penelitian. Pada Kecamatan Jeunib peneliti memilih Desa Blang Poroh dan Desa Meunasah Lueng.

3.4 Jenis dan Sumber Data

²⁴ Paham Ginting dan Syafrizal Helmi Situmorang. 2008. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*. Medan: USU Press. Hal. 78.

²⁵ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. PT. Bumi Aksara: Jakarta. 2008. Hal.53.

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data yang disajikan kedalam bentuk verbal dan bukan dalam bentuk angka.²⁶ Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data-data tersebut diperoleh²⁷:

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari suatu sumber tertentu dan diolah sehingga menjadi bahan untuk suatu karya ilmiah. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸ Dalam hal ini sumber data primer dihimpun dalam analisis terhadap “Konsep Gender Dalam Perspektif Perempuan di Aceh (Studi kasus Kabupaten Bireuen)”. serta sumber data yang akan didapatkan melalui wawancara-wawancara yang akan saya lakukan secara mendalam dengan beberapa masyarakat yang akan menjadi sumber data saya.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada kemudian penulis gunakan untuk menjadi sumber data didalam karya ilmiah penulis. Dalam hal ini penulis mengambil sumber sekunder dari jurnal-jurnal, buku, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian penulis.²⁹

3.5 Informan Penelitian

²⁶ Noeng Mu'hadjir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Rakesarasin: Yogyakarta. 1996. Hal.2

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta 1993. hlm. 3

²⁸ Amirudin dan zainal azikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2003. Hal.30.

²⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta 1993. Hal.129.

Informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, informan haruslah seseorang yang memahami serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.³⁰ Penulis memilih informan dengan latar belakang yang berbeda untuk melihat adanya perbedaan pandangan antara informan yang satu dengan yang lain.

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	IRT (Ibu Rumah Tangga)	4 Orang
2.	Pedagang	4 Orang
3.	Pegawai	4 Orang
4.	Petani	4 Orang
	Jumlah	16 Orang

³⁰ Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Grub: Jakarta. 2007. Hlm.76

3.6 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

3.6.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian akan semakin kredibel jika didukung dengan adanya foto atau karya tulis.³¹

3.6.2 Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.³²

3.6.3 Observasi

Observasi merupakan proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Observasi mengumpulkan data secara langsung dari lapangan.³³

3.7 Teknik pemeriksaan keabsahan data

³¹ M.Raharjo. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Universitas Islam Negeri Malang.

³² M.Raharjo. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.

³³ Iryana dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam.

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data biasa digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif tersebut seperti mengatakan bahwa penelitian ini bersifat tidak ilmiah. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas.³⁴

3.7.1 Kredibilitas

Kredibilitas data dibutuhkan untuk menguji data penelitian yang disajikan oleh peneliti, sehingga data tersebut sudah sesuai dengan fakta yang ada. Dalam uji kredibilitas memiliki beberapa teknik seperti trigulasi, pengecekan anggota, diskusi, sumber, dan pengecekan kecukupan referensi.³⁵

3.7.2 Transferabilitas

Transferabilitas adalah suatu usaha untuk mencapai “uraian rinci” dalam penelitian kualitatif guna mencapai hasil yang optimal. Untuk itu penelitian ini harus melaporkan setiap hasil penelitian secara jelas, rinci, dan terpercaya. Serta penulis mengusahakan agar penelitian ini dapat menjawab segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca.³⁶

3.7.3 Dependabilitas

³⁴ Arnild Augina Mekarisce. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Universitas Jambi. 2020. Hal.147.

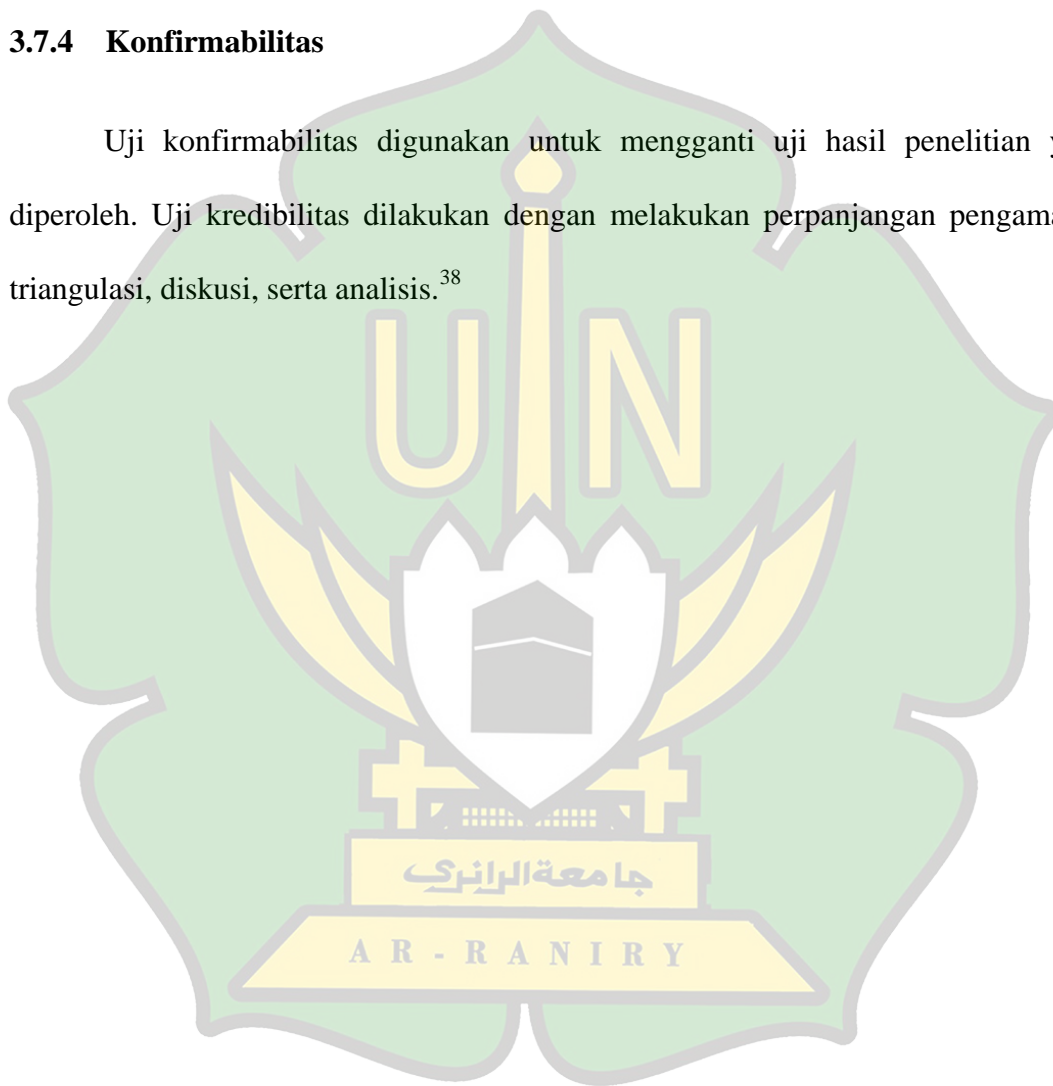
³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. 2009. Hal.213.

³⁶ Hielda Octaviani. *Tipologi Masyarakat Aceh pada perang Aceh-Belanda 1873-1942*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry: Banda Aceh. 2020. Hal.26.

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji ini dilakukan dengan merekam menggunakan video selama penelitian dan merekam kegiatan yang dilakukan.³⁷

3.7.4 Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas digunakan untuk mengganti uji hasil penelitian yang diperoleh. Uji kredibilitas dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, diskusi, serta analisis.³⁸



³⁷ Herry Agus Susanto. *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*. 2015. Hal.55

³⁸ Iwan Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran Kuningan: Kuningan. 2019. Hal.186.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Gender

Pergerakan kaum perempuan di Indonesia muncul pada abad 19. Permasalahan gender di Indonesia saat itu dikenal dalam bahasa emansipasi wanita dengan R.A. Kartini sebagai ikon dari gerakan tersebut. R.A. Kartini merupakan seorang anak dari bupati Jepara yang memiliki cita-cita tinggi untuk mengangkat martabat kaum perempuan, sehingga muncul ide gerakan emansipasi yang dipelopori oleh beliau. Pada waktu itu perempuan Indonesia merasa terkekang dengan adanya budaya yang tidak mengizinkan kaum perempuan untuk memiliki pendidikan yang tinggi seperti kaum laki-laki karena perempuan dianggap tidak memiliki peran dalam kehidupan. Perempuan hanya dibebani dengan kewajiban mengurus, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk keluar rumah, kebebasan bersekolah, kebebasan untuk bekerja di luar rumah, dan kebebasan untuk memiliki jabatan seperti kaum laki-laki. Adanya gerakan emansipasi wanita yang dilakukan oleh Kartini merupakan sebuah bentuk perjuangan beliau terhadap kaum perempuan dalam mendapatkan pendidikan serta perjuangan dalam mengangkat kaum wanita hingga setara dengan kaum laki-laki³⁹.

³⁹ Syahrul Amar. *Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX*. Universitas Hamzawadi. Vol.1 No.2. 2017. Hlm. 106-111

Perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender tidak berhenti di R.A. Kartini. Pada masa pra-kemerdekaan, Indonesia memiliki organisasi perempuan pertama yaitu Poetri Mahardika yang di bentuk oleh Boedi Oetomo. Setelah itu, muncul beberapa organisasi perempuan lainnya seperti Jong Java Meiskering, Young Javanese Girls Circle, Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, dan lain-lain. Pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, gerakan perempuan Indonesia bersatu dalam Kongres Perempuan ke satu yang memunculkan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Pada masa pemerintahan Soekarno, sebagian mantan pejuang perempuan mengatakan bahwa perjuangan perempuan di jaman kemerdekaan relatif sulit dibandingkan jaman penjajahan. Masa Soekarno perempuan hanya di akui haknya dalam politik dan antara laki-laki maupun perempuan memiliki penghasilan yang sama karena masa itu telah ada UU mengenai kesetaraan gender. Perjuangan lain yang dilakukan perempuan di masa Soekarno yaitu perjuangan untuk menentang adanya poligami. Pada masa Pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU perkawinan yang di anggap sebagai langkah maju untuk menuju kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, terbentuknya Kementrian Muda Urusan Peranan Wanita pada tahun 1974. Adanya kementrian ini guna meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan serta memperjuangkan kesetaraan gender⁴⁰.

⁴⁰ Muhajir Darwin. *Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 7 No. 3. 2004. Hlm. 285-289

Berbeda dengan daerah di Indonesia lainnya, Aceh sudah lebih dulu mengenal kesetaraan gender jauh sebelum Indonesia merdeka. Wanita Aceh di masa lampau memiliki kedudukan dalam pemerintahan. Eksistensi perempuan Aceh pada masa kejayaan tidak bisa diragukan. Aceh banyak melahirkan pejuang tangguh wanita seperti Laksamana Malahayati yang menjadi panglima armada, perang perempuan pertama di Dunia. Kiprah Laksamana Malahayati bermula pada saat terbentuknya Pasukan Inong Balee yang disebut sebagai hasil ide dari beliau sendiri, Pasukan Inong Balee terdiri dari para prajurit janda. Dalam sejarahnya Armada Inong Balee berkali-kali ikut dalam pertempuran di Selat Malaka dan pantai-pantai Timur Sumatera.⁴¹

Tidak berhenti disitu, kiprah Laksamana Malahayati kian menanjak pada saat ia mendapatkan jabatan tertinggi di angkatan laut kerajaan Aceh.⁴² Semasa hidupnya Laksamana Malayahati sangat berjasa pada kesultanan serta pandai dalam mengatur strategi-strategi perang.⁴³

Selain Laksamana Malahayati ada pula perempuan Aceh lainnya yang memiliki peranan penting dalam memegang tampuk kekuasaan. Pertama, Sultanah Safiatuddin Syah. Sultanah Safiatuddin Syah menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi pertama di kerajaan Aceh Darussalam yaitu pada tahun 1641-1675 M. Ia merupakan istri dari Sultan Iskandar Thani. Sultanah Sri Ratu Tajul Alam

⁴¹ Hasjmy. 1990. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 143

⁴² Goodnewsfromindonesia.id. 2015. *Perempuan Aceh, Laksamana Perang Pertama di Dunia*.

⁴³ Sri Lestari Wahyuningrum. 2005. *Peran Perempuan dan Era Baru di Nanggroe Aceh Darussalam*" *Antrpologi Indonesia*, Vol.29, No. 1. Hal. 96

Safiatuddin Syah di percaya untuk menjadi pemimpin Kerajaan Aceh Darussalam menggantikan suaminya yang saat itu telah wafat. Ia terpilih sebagai pengganti Sultan Iskandar Thani setelah melalui musyawarah yang panjang dan setelah memenuhi syarat-syarat yang ada⁴⁴. Ratu Safiatuddin memimpin kerajaan Aceh Darussalam selama lebih kurang 35 tahun, di bawah kepemimpinannya banyak permasalahan yang muncul, namun Ratu yang dikenal sebagai wanita tangguh tersebut mampu mempertahankan dan mengatasi permasalahan yang ada serta berhasil dalam mengembangkan jiwa dan raga bangsa Aceh menuju kepada kemakmuran dan ketentraman⁴⁵.

Kedua, Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin yang menjadi pengganti Ratu Shafiatuddin sebagai Sultanah kerajaan Aceh Darussalam. Ia merupakan wanita yang disiapkan langsung oleh Ratu Shafituddin. Dalam masa pemerintahannya, banyak sekali tantangan yang di hadapi oleh beliau baik dari luar maupun dari dalam. Di bawah kepemimpinan Sultanah Naqiatuddin, ada golongan yang menginginkan kursi kesultanan sehingga mereka melakukan sabotase dengan melakukan pembakaran Mesjid Raya Baiturrahman dan Istana Seri Sultan. Menghadapi beberapa permasalahan yang datang, akhirnya Sultanah Naqiahtuddin erusaha memperkuat

⁴⁴ Dedeh Nur Hamidah, Aan Nurjanah. *Kepemimpinan Para Perempuan Muslim Dari Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Vol.5, No. 1. 2017. Hlm. 65

⁴⁵ Fitriah M. Suud. *Perempuan Islam Dalam Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam (1642-1699 M)*. Serambi Tarbawi. Vol. 3, No. 1. 2015. Hlm. 27-28.

kedudukannya dan kedudukan pemerintah pusat, dengan cara melakukan perubahan dalam beberapa pasal Qanun⁴⁶.

Ketiga, Ratu Zakiatuddin yang selanjutnya memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Selama Ratu Zakiatuddin memegang kekuasaan ia juga mendapatkan tantangan berat seperti pendahulunya, namun adanya Kadli Malikul Adil Syekh Abdurrauf Syiah Kuala yang membawa pengaruh besar tantangan tersebut dapat teratasi.⁴⁷

Keempat, Ratu Kamalatsyah yang menggantikan Ratu Zakiatuddi dalam memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Pada saat penobatan Ratu Kamalat Syah, ada golongan yang terus menerus ingin merebut kekuasaan sehingga masa penobatan mengalami gangguan. Puncak dari gangguan tersebut yaitu setelah Syekh Abdurrauf meninggal dan Kadli Malikul Adil yang baru tidak cukup kuat melawan pihak lawan. Kemudian, Kadli Malikul Adil yang baru bergabung dengan pihak oposisi yang menginginkan kekuasaan Ratu Kamalatnya, Akhirnya Ratu Kamalat Syah turun tahta pada tanggal 20 Rabiul awal 1109 H(1699 M)⁴⁸.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan di masa lampau, menunjukkan bahwa perempuan sudah dari dulu menunjukkan kemampuannya dalam dunia pemerintahan. Walaupun pada masa Sultanah memimpin terdapat beberapa masalah yang berasal dari pihak yang menentang keras perempuan untuk menjadi pemimpin

⁴⁶ Dedeh Nur Hamidah, Aan Nurjanah. *Kepemimpinan Para Perempuan Muslim Dari Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699)*. Hlm.68-69.

⁴⁷ Dedeh Nur Hamidah, Aan Nurjanah. *Kepemimpinan Para Perempuan Muslim Dari Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699)*. Hlm.68-69.

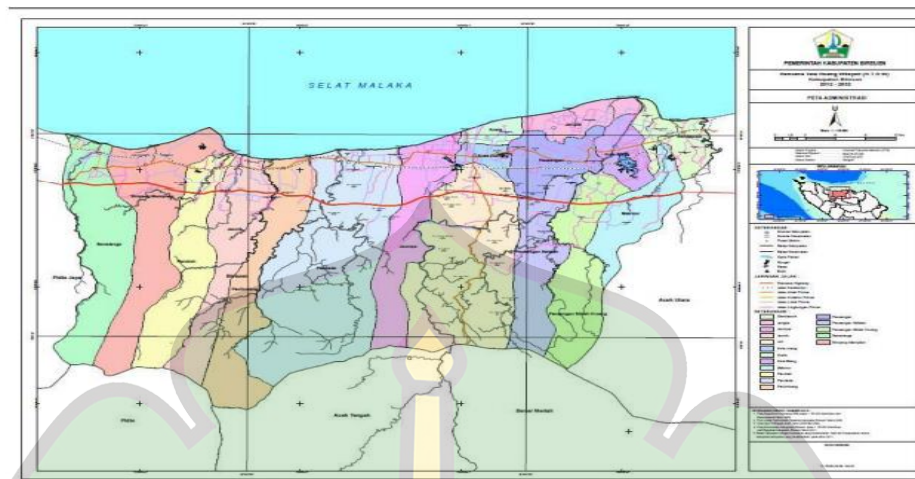
⁴⁸ A. Hasjmy, op. cit. Hlm 21-22

dalam pemerintahan. Di sini juga menjelaskan bahwa Aceh sudah mengenal tentang adanya kesetaraan gender serta hak-hak perempuan. Kesetaraan gender memang perlu adanya agar hak-hak perempuan tidak begitu saja dilenyapkan oleh segelintir orang. Seperti di zaman sekarang ini masih ada perempuan yang tidak terpenuhi hak-haknya, hal ini karena adanya budaya patriarki yang kian merajalela di kehidupan sehari-hari. Memang pada dasarnya budaya patriarki dan pemahaman gender saling berlawanan.

Di Aceh budaya patriarki masih berjalan hingga saat ini. Adanya budaya patriarki di Aceh sangat membelenggu perempuan-perempuan Aceh. Dalam beberapa hal kaum perempuan di Aceh mendapatkan sebuah ketidakadilan. Di kehidupan sehari-hari tidak sedikit yang menyepelkan perempuan dengan menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya.

Padahal dalam kehidupan nyata perempuan tidak lah lemah itu. Selain itu, adapula anggapan bahwasanya perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya perempuan akan kembali ke dapur. Hal-hal seperti inilah yang secara tidak langsung menimbulkan sebuah ketimpangan dan diskriminasi bagi perempuan.

4.2 Gambaran Umum Kabupaten Bireuen



Gambar 4.1

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten Bireuen saat ini dipimpin oleh Muzakkar A Gani, beliau menjabat sebagai bupati menggantikan bupati sebelumnya yaitu Alm. Saifannur yang telah meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2020 lalu.⁴⁹

Kabupaten Bireuen atau dikenal juga dengan sebutan “Kota Juang” merupakan salah satu Kabupaten yang pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia yang ketiga selama seminggu, setelah jatuhnya Yogyakarta ke tangan penjajahan Belanda. Bireuen dikenal sebagai salah satu daerah dari Provinsi Aceh yang pada masa lalu menjadi daerah tempat berdirinya Kerajaan Islam ternama yaitu Kerajaan

⁴⁹ <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/19/plt-gubernur-lantik-muzakkar-jadi-bupati-bireuen>. Diakses 4 Januari 2022.

Jeumpa yang terletak di Desa Blang Seupeung. Bireuen juga pernah menjadi salah satu protektorat Kesultanan Aceh Darussalam.⁵⁰

Kabupaten Bireuen pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara, pada tahun 1999 dilakukannya pemekaran melalui peraturan perundang-undangan sehingga terbentuklah Kabupaten Bireuen. Kabupaten Bireuen memiliki luas wilayah 1.796,31 km² yang terdiri dari 17 kecamatan. Kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunib, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang⁵¹

Secara administrasi, Kabupaten Bireuen secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut:

- a. Utara, berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
- c. Timur, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara
- d. Barat, berbatasan dengan Kabupaten Pidie

Di kabupaten Bireuen termasuk wilayah agraris yang setengahnya termasuk wilayah pertanian, hal ini lah yang membuat 33,05 persen penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Selain pertanian, Kabupaten Bireuen juga memiliki potensi kelautan yang menjanjikan bagi masyarakat.⁵²

⁵⁰ Yusuf Al Qardhawi. 2019. *The History of Aceh*. Yayasan PeNa: Banda Aceh. Hal. 83-85.

⁵¹ <https://www.bireuenkab.go.id/> Diakses tanggal 15 Januari 2022.

⁵² <http://www.bireuenkab.go.id/halaman/sejarah>. Diakses tanggal 15 Januari 2022.

Kabupaten Bireuen di nilai sebagai kabupaten yang berpotensi untuk berkembang, ini dinilai dari letak wilayah Bireuen yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang besar.⁵³

4.3 Konsep Gender Dalam Perspektif Perempuan Aceh

Munculnya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah terjadi begitu lama dan melalui proses yang begitu panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural terutama di lingkungan tempat keberadaan seseorang yang diciptakan oleh masyarakat sehingga dengan kata lain perbedaan gender yang tercipta di suatu tempat dikarenakan masyarakat sendiri yang membentuknya.⁵⁴

Secara historis konsep gender pertama kali dibedakan oleh sosiolog asal Inggris Ann Oakley yang membedakan konsep gender dan sex. Dimana, sex adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang menyangkut tentang perbedaan biologis mereka. Sedangkan gender dimaksudkan untuk menjelaskan maskulin dan feminim. Dengan demikian konsep gender lebih menekankan pada perkembangan aspek maskulinitas dan feminis seseorang. Gerakan feminisme yang mengusung isu gender sebenarnya lahir dengan latar belakang kultural historis yang dialami dunia barat. Walaupun beberapa tokoh feminis bersikukuh bahwa gender

⁵³ Sonny M Ikhsan. 2010. *Peranan Pemerintah Kabupaten Bireuen Dalam Meningkatkan Sektor Perindustrian*. Vol. 1. No. 1. Hal. 51.

⁵⁴ Mustika dan Siti. Implementasi Perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Provinsi Aceh. Universitas Brawijaya. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. 2018. Vol. 2. No.2. Hal. 74.

bukanlah konsep barat, tetapi berasal dari konstruksi linguistik atau perpaduan bahasa yang menekankan pada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya, gender identik dengan gerakan feminis dan feminisme sendiri adalah gender.⁵⁵ Kesetaraan gender (gender equality) merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka, dan peran gender yang kaku.⁵⁶

Indonesia Pada abad XIX perempuan memfokuskan diri dalam pergerakan kesetaraan dalam dunia Pendidikan. Karena pada saat itu perempuan di Indonesia terkekang oleh budaya yang membuat mereka tidak bisa merajut Pendidikan tinggi seperti laki-laki. Munculnya gender di Indonesia berawal dari adanya budaya kuat yang mengikat perempuan pada waktu itu. pada saat itu perempuan hanya dianggap sebagai *the second sex* untuk membantu kaum laki-laki saja. Hal ini menjadi pemicu yang mendorong kaum perempuan untuk melakukan pemberontakan terhadap budaya tersebut.⁵⁷ Pergerakan perubahan dalam gender bukan hanya berpengaruh di Indonesia saja, pergerakan tersebut juga berpengaruh ke daerah-daerah bagian Indonesia, Aceh salah satunya.

⁵⁵ Miskahuddin. *Pengaruh Sosialisasi Gender Terhadap Pola Pikir Perempuan Aceh (Studi kasus Banda Aceh dan Aceh Besar)*. International Journal of Islamic Studies. 2014. Vol, 1. No. 2. Hal. 299.

⁵⁶ Dede Nurul Qomariah. *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.....*Hal. 53.

⁵⁷ Syahrul Amar. *Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX*. Universitas Hamzawadi. Vol.1. No.2. 2017. Hal. 106-111.

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Aceh telah lebih dulu mengenal adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Peran perempuan dalam konteks publik sangatlah besar pada masa kerajaan Aceh, di masa itu perempuan Aceh dapat memiliki peran utama seperti menjadi sultanah, legislator, dan juga sebagai panglima perang. Perbedaan gender bukanlah penghalang bagi para perempuan Aceh untuk berkiprah pada ranah publik sehingga, perempuan Aceh mampu melahirkan perempuan hebat serta heroik dan patriotisme seperti pada masa Sultanah Safiatuddin syah, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, Sultanah Inayat zakiatuddin syah, dan Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah. Sejak abad ke-17 Aceh sudah dipimpin oleh para perempuan-perempuan hebat, hal ini membuktikan bahwa gender tidak di marginalisasi dalam masyarakat kala itu. Perempuan saat itu diterima di dalam ruang publik sebagai sosial yang wajar, meskipun saat itu Sultanah terakhir diturunkan secara tidak wajar.⁵⁸

Berbagai perjuangan yang dilakukan oleh perempuan menjadikan perempuan sejak masa kerajaan Aceh sampai pada masa penjajahan Belanda, telah melahirkan “tinta emas” bagi Aceh dan Nusantara. Hal ini terwujud karena adanya pemberian kesempatan, peluang, dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian ini yang membuat Aceh berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara.

⁵⁸ Sher Banu, A.L.Khan. *Rule Behind The Silk Curtain: The Sultanahs of Aceh 1641-1699*. (Unpublished Doctoral Thesis, Queen Mary, Universitas of London, 2009).

Dalam masyarakat Aceh pemahaman gender sedikit menurun dibandingkan beberapa ratus tahun yang lalu. Setelah kemerdekaan republik Indonesia, masih minim adanya nama perempuan Aceh yang berhasil menyandang harumnya nama seperti pemimpin perempuan pendahulunya. Sedangkan saat ini akses pendidikan yang diberikan bagi perempuan Aceh sangatlah besar.⁵⁹

Sebagian orang menyebutkan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang dibesar-besarkan. Masyarakat yang berpikir konservatif seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun masyarakat harus berbeda. Seperti, perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, percuma menghabiskan biaya karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Hal-hal seperti inilah yang masih sering dipertanyakan, apakah perempuan atau laki-laki yang akan diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah. Padahal hak tersebut wajib didapatkan oleh keduanya. Kesetaraan gender seperti ini belum bisa diwujudkan karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya dan patriarki.⁶⁰

Tingginya budaya patriarki di Aceh kemudian memunculkan beberapa perspektif perempuan Aceh mengenai konsep gender. Dalam pandangan perempuan Aceh terdapat dua pemaknaan yang berbeda mengenai konsep gender. Dari dua pemaknaan berbeda ini kemudian dibentuk dua kelompok. Pada kelompok pertama, perempuan Aceh menjelaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

⁵⁹ Chahayu Astina. 2019. *Perspektif Gender Pada Masyarakat Kota Banda Aceh*. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Vol. 1. No. 2. Hal. 159.

⁶⁰ Chahayu Astina. *Perspektif Gender Pada Masyarakat Kota Banda Aceh*. IAIN Langsa. Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. 2016. Vol, 1. No.2. Hal. 157.

tidaklah sama, jikalau pun ada itu hanya pada konteks tertentu. Pada kelompok kedua, perempuan Aceh menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan.

Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah. Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan yang dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Perbedaan gender akan menjadi masalah jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁶¹

Adapun beberapa perspektif dari kelompok pertama (perempuan yang tidak setuju dengan adanya kesetaraan), sebagai berikut:

*“Perempuan dan laki-laki berbeda kedudukannya baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Seperti, laki-laki bertugas untuk mencari nafkah sedangkan perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga. Sama halnya dengan dunia perpolitikan di mana hanya laki-laki yang diperbolehkan memimpin sedangkan perempuan tidak diperbolehkan”.*⁶²

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa ada kedudukan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut seperti kewajiban mengurus rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dan kegiatan mencari nafkah dilakukan oleh kaum lelaki saja. Pada ranah perpolitikan pula perempuan

⁶¹ Ahmad, K. B. 2015. *Perempuan Aceh dalam Perspektif Antropologi. Gender Equality*. Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol. 1. No. 2. Hal. 37–48.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Sugiarti (Masyarakat Kec. Jeunib). 16 Februari 2021.

tidak diperbolehkan untuk ikut serta, sebaliknya pada laki-laki tak ada larangan memilih untuk terjun pada dunia politik atau tidak.

Hal seperti ini menunjukkan bahwa di masyarakat Bireuen masih ada bentuk dari pemarginalan yang dilakukan terhadap kedua jenis gender. pemarginalan tersebut berupa pemisahan atau mengkotak-kotakkan perempuan dan laki-laki baik dari pekerjaan maupun dalam bentuk lainnya. Padahal, seperti yang kita ketahui baik laki-laki maupun perempuan tidak ada larangan dalam mencari nafkah.

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh ibu Nilawati mengenai pelarangan perempuan untuk dijadikan pemimpin karena kedudukan perempuan di bawah laki-laki:

*“Menurut ibu Nilawati, perempuan memanglah di rumah dan laki-laki memanglah bekerja di luar seperti berkebun, kantor, dll. Kalau posisi tersebut dibalik saya rasanya tidak akan sanggup. Saya setuju adanya kesetaraan dalam hal saling membantu tapi dalam kedudukan ada perbedaan derajat perempuan di bawah lelaki. Dalam rumah tangga pasti ada perbedaan seperti lebih mendahulukan suami saat makan, terkadang juga makan sama-sama . wajar saja kalau perempuan ikut berpolitik tetapi harus dengan seizin suami dan saya pun tetap tidak memilih perempuan karena memang derajat perempuan di bawah laki-laki”.*⁶³

Berdasarkan wawancara di atas dengan ibu Nilawati menunjukkan bahwa, derajat perempuan di bawah laki-laki. walaupun ada kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki itu hanya kesetaraan dalam hal tolong menolong. Adanya perbedaan kecil di dalam rumah tangga seperti mendahulukan suami baik disaat makan atau saat lainnya menunjukkan kedudukan suami memang lebih tinggi dibanding perempuan.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nilawati (Warga Kec. Jeunib). 16 Februari 2021.

Suami sebagai pemegang kendali bagi keluarga sehingga apapun yang dilakukan oleh istri atau perempuan haruslah memiliki izinnya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa perempuan terjun ke dunia politik memang sesuatu yang wajar, namun beliau menolak untuk memilih perempuan sebagai calon legislatif atau pemimpin karena perbedaan derajat.

Dalam konteks di atas, permasalahan yang muncul bukan karena adanya ketidakpercayaan terhadap sesama perempuan. Melainkan karena masih adanya pandangan meremehkan bagi sesama perempuan dengan sebab rendahnya derajat perempuan tersebut.

Hal yang sama diutarakan pula oleh ibu Mita yang mengatakan bahwa:

*“Gender kan melihat pada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kalau menurut saya untuk beberapa alasan kesetaraan gender memang penting, seperti kesetaraan dalam mendapatkan hak. Hak yang dimaksud itu adalah hak dalam bekerja. Namun, kalau konteksnya persamaan kedudukan pada hal lain tentu berbeda. Di dalam agama jelas bahwa kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi. Dari segi politik sebenarnya tidak ada masalah bagi perempuan, sah saja terjun ke situ. Tetapi kalau sampai mencalonkan diri, saya sebagai perempuan tidak mendukung. Saya lebih mendukung laki-laki karena dalam agama seperti itu. Intinya kesetaraan sama saja asal tidak ada kaitannya dalam agama”.*⁶⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu hal yang membahas mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tersebut didapat jika dalam ranah tersebut tidak memiliki kaitannya dalam agama, contohnya seperti mendapatkan hak dalam bekerja. Jika sesuatu sudah masuk pada ranah agama, maka kesetaraan itu tidak ada. Dikatakan bahwa di dalam agama

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mita (Warga Kecamatan Jeunib). 15 Januari 2022.

kedudukan tersebut berbeda. Seperti urusan kepemimpinan yang sudah jelas itu tugas dari laki-laki.

Hal inilah yang mendasari sebagian masyarakat tidak memilih sesama perempuan saat pemilihan calon legislatif, walaupun tidak ada larangan bagi perempuan untuk sekedar terjun ke ranah politik. Kepemimpinan perempuan dianggap tidak sesuai dengan yang diajarkan agama dan hal itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Sehingga bagi sebagian perempuan di Kabupaten Bireuen menjatuhkan pilihan kepada laki-laki dalam hal kepemimpinan.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang mengatakan bahwa:

*“.... perempuan tidak bisa kalau ingin ke politik, apalagi kalau sampai jadi pemimpin di ruang lingkup besar jelas tidak boleh. Sejatinya kan yang menjadi pemimpin itu orang laki. Saya berpendapat seperti ini karena saya melihat kalau di agama dijelaskan pemimpin itu laki-laki dan di agama juga dijelaskan kalau perempuan sebaiknya di rumah”.*⁶⁵

Tidak diperbolehkannya perempuan untuk terjun ke ranah politik merupakan bentuk dari kurangnya kebebasan atau ruang gerak bagi perempuan. hal ini seperti penjelasan di atas yang mengatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan ikut serta atau berpartisipasi ke dunia politik karena tempat bagi perempuan hanyalah di rumah.

Padahal, perempuan juga memiliki hak di ranah publik sama dengan laki-laki dan tempat bagi perempuan tidak hanya di rumah. Jenis kelamin sering sekali dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi. Diskriminasi dapat berupa pemberian

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rosmawati (Warga Kecamatan Jeunib). 15 Januari 2022.

akses yang mudah bagi laki-laki ke ranah publik sedangkan bagi perempuan akses ke ranah publik dipersulit.

Menurut narasumber lainnya mengenai kesetaraan gender bahwa:

*“Mau bagaimana pun tidak ada itu kesetaraan kita perempuan dengan laki-laki. Pemimpin rumah tangga tidak bisa disamakan dengan kita perempuan, jelas ada perbedaannya. Dalam rumah tangga beda dalam lingkungan juga beda. Kalau di rumah apa-apa itu kan harus ada perizinan suami, dari situ saja sudah bisa dilihat perbedaan. Di lingkungan masyarakat beda lagi, kalau laki-laki boleh duduk di warung kopi, tapi kalau perempuan duduk di situ kesannya tidak bagus”.*⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan perlakuan baik di dalam keluarga maupun di lingkungan bermasyarakat. Perbedaan perlakuan dalam lingkungan masyarakat seperti pemberian kesan yang berbeda ketika laki-laki yang bersantai di warung kopi dengan saat perempuan yang bersantai di tempat tersebut.

Sebagian masyarakat masih menganggap perempuan yang berada di warung kopi sebagai suatu hal yang tabu, dan mengklaim bahwa tempat tersebut hanya tempat bersantainya laki-laki bukan perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa perempuan sebaiknya berada di rumah.

Hasil wawancara dengan ibu Nazariah sebagai berikut:

“Memang kita sebagai manusia sudah memiliki peran masing-masing. Kalau perempuan peran utamanya kan bekerja di rumah mengurus rumah, kalau laki-laki perannya mencari nafkah. Dia bekerjanya di luar bukan ngerjain pekerjaan yang di rumah seperti mencuci piring, karena kan melihat dari

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rosmawati (Warga Kecamatan Jeunib). 15 Januari 2022.

*peran awal tadi. Jadi, melihat dari hal itu langsung kelihatan perbedaannya, kalau kita setarakan kedudukannya itu tidak bisa kan sudah ada peran masing-masing. Bekerja pun paling petani dan pedagang seperti itu yang memang kerjanya di dekat-dekat rumah. Saya sendiri bekerja sebagai petani karena punya sawah kasihan kalau tidak digunakan, lalu tidak ada larangan dari suami saya bekerja”.*⁶⁷

Sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan sudah memiliki peran yang melekat dalam dirinya. seperti yang dikatakan oleh ibu Nazariah di atas, yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran utama sebagai seorang yang mengurus rumah tangga dalam artian mencuci piring, mencuci pakaian, menyiapkan makanan untuk suami dan anak, serta pekerjaan rumah lainnya. Sedangkan laki-laki memiliki peran sebagai orang yang bekerja di luar rumah, dalam artian mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

Kedudukan perempuan dan laki-laki itu tidak bisa setara karena akan merusak peran-peran seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, menurut beliau ada beberapa bidang pekerjaan yang boleh digeluti oleh perempuan yaitu petani dan pedagang. Pekerjaan ini diperbolehkan dengan syarat lokasinya harus berdekatan dengan rumah.

Masih adanya anggapan bahwa peran perempuan hanya sebagai seseorang yang mengurus rumah tangga, menghilangkan kesetaraan bagi perempuan itu sendiri. Padahal, peran perempuan tidak terbatas sampai di situ saja. Perempuan memiliki banyak peran selain mengurus rumah, salah satunya peran dalam ruang lingkup bermasyarakat.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazariah (Masyarakat Kecamatan Jeumpa). 15 Januari 2022.

Narasumber lain yaitu ibu Siti Sri Dewi mengatakan:

“kedudukan antara perempuan dengan laki-laki memanglah berbeda, sudah sepatutnya bila wanita menyadari kedudukannya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Seorang perempuan tidak boleh menyalahkan kedudukannya sehingga kesetaraan gender itu perlu tetapi tidak melawan kodrat”⁶⁸.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa gender adalah sebuah kodrat. Kedudukan perempuan dan laki-laki tidak bisa disamakan karna sebuah kodrat yang telah ditetapkan tidak akan bisa dirubah. Menurutnya kesetaraan gender memanglah perlu tetapi harus mengingat kodrat tersebut.

Kuatnya citra gender sebagai kodrat, yang melekat pada masyarakat, bukanlah hal yang melalui proses sesaat melainkan melalui suatu proses dialektika, konstruksi sosial yang dibentuk, diperkuat, disosialisasikan secara evolusional dalam jangka waktu lama, baik melalui ajaran-ajaran agama, negara, keluarga maupun budaya masyarakat, sehingga perlahan lahan citra tersebut mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara biologi dan psikologi. Dimana melalui proses sosialisasi, seseorang akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dengan proses sosialisasi seseorang diharapkan menjadi tau bagaimana iya mesti bertingkah laku di tengah lingkungan masyarakat dan lingkungan budayanya, sehingga bisa menjadi manusia masyarakat dan beradab⁶⁹.

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Sri Dewi (Warga Jeumpa). 17 Februari 2021.

⁶⁹ Miskahuddin. Pengaruh Sosialisasi Gender Terhadap Pola Pikir Perempuan Aceh (Studi kasus Banda Aceh dan Aceh Besar). International Journal of Islamic Studies. 2014. Vol, 1. No. 2. Hal. 303-304.

Berbeda dari penjelasan sebelumnya yang tidak setuju terhadap kesetaraan gender, Pada kelompok kedua mereka setuju bahwa kesetaraan gender merupakan hal penting. Beberapa perspektif dari kelompok kedua (kelompok yang menganggap bahwa kesetaraan itu penting adanya) tersebut yaitu:

*“Kalau bagi saya yang seorang perempuan kesetaraan gender itu penting antara perempuan dan laki-laki. Baik perempuan atau laki-laki memang memiliki hak yang sama, seperti mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau perlakuan lainnya dalam masyarakat. Tidak boleh berbeda karena kita sama-sama makhluk Tuhan, kita semua sama dalam pandangan Allah. Walaupun terkadang memang masih ada itu pembeda-bedaan di masyarakat”.*⁷⁰

Dari hasil di atas menjelaskan bahwa adanya kesetaraan gender merupakan suatu hal yang penting bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam pandangan Allah, manusia sebagai makhluk ciptaannya memiliki kedudukan yang sama. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesamaan dalam mendapatkan hak-haknya. Seperti mendapatkan hak pendidikan, hak dalam pekerjaan, atau mendapatkan hak yang sama terhadap perlakuan di masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki yang didapatkan oleh sebagian perempuan yang ada di Kabupaten Bireuen.

Ada sedikit perbedaan dari pernyataan narasumber sebelumnya dengan ibu Fitria, berikut penjelasan ibu Fitria mengenai konsep gender:

“Menurut saya gender itu seorang perempuan itu mencari kesetaraan. Kalau saya melihat gender tidak salah karna masa Rasulullah melihat Khadijah juga berperan tapi tidak melawan kodratnya jadi tidak ada salahnya. Penting

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Marlina (Masyarakat Kecamatan Jeumpa). 16 Januari 2022.

*tidaknya kesetaraan gender itu tergantung asumsinya beda-beda dan menurut kebutuhan, kalau kita sayang suami kita harus sama-sama jangan suami terbebani. Pada dasarnya memang perempuan itu di bawah tidak ada kata kata setara. Walaupun ada pemimpin perempuan tapi tetap kedudukannya dibawah laki laki. perempuan itu kalau dia mau berkarir gak masalah menurut asumsi seperti Aisyah sendiri adalah perawi hadist. Kalau hanya di rumah saja berat tidak ada kebebasan pada dia. Dalam kepemimpinan kalau itu jalan tidak membawa kearah lain sah sah saja, kalau seorang perempuan itu lebih tinggi pengetahuannya dari laki laki ya kita pilih perempuan itu gak mesti harus memilih laki laki. kalau perempuan itu mendidik walau tidak menjadi guru”.*⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa gender bukanlah sesuatu yang salah. Mengingat bahwa pada masa Rasulullah Sayyidah Khadijah juga memiliki perannya sendiri. Jika secara kedudukan dalam agama memang di bawah laki-laki, namun dalam hal lain tentu kedudukan itu sama. Dalam hal kepemimpinan diperbolehkan bagi perempuan asalkan tidak membawa ke arah yang salah. Karena pada dasarnya perempuan memiliki kecerdasan yang tinggi. Beliau merujuk pada tokoh perempuan pada masa Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Aisyah dan yang menjadi perawi hadist semasa hidupnya.

Gender diartikan sebagai sebuah proses pencarian atas kesetaraan yang dilakukan oleh perempuan. kesetaraan terhadap sebuah kebebasan bagi kaum perempuan. Karena pada dasarnya setiap manusia menginginkan kebebasan. Kebebasan dalam hal ini memiliki arti yang luas baik berupa kebebasan berpendapat, kebebasan dalam pekerjaan, kebebasan dalam mengambil keputusan, serta kebebasan

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fitria (Masyarakat Jeunib). 16 Februari 2021.

lainnya. Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kabupaten Bireuen selaku responden:

“Dalam hal mengambil keputusan harusnya perempuan juga ikut dilibatkan karena perempuan juga bagian dari masyarakat. Sehingga, seandainya ada perempuan yang maju di perpolitikan maka saya sebagai seorang perempuan yang menginginkan keadilan maka saya percayakan sepenuhnya suara saya terhadap perempuan”.⁷²

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa yang termasuk ke-dalam bagian masyarakat tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga termasuk bagian dari masyarakat. Sehingga dalam hal pengambilan keputusan tentu perempuan harus dilibatkan. Dalam hal memilih kandidat, sebagai seorang perempuan yang menginginkan adanya keadilan, maka akan memberikan sepenuhnya hak suaranya kepada sesama perempuan.

Dalam pengambilan keputusan sudah sepatutnya perempuan ikut andil di dalamnya, agar pada saat pengambilan keputusan di lingkungan bermasyarakat juga di ranah politik, tidak memunculkan suatu keputusan yang merugikan kaum perempuan.

Memberikan sepenuhnya hak suara kepada sesama perempuan merupakan suatu hal yang tepat. Permasalahan dalam kehidupan sosial yang dihadapi oleh perempuan hanya bisa diatasi pula oleh sesama perempuan. Sangat perlu bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaannya terhadap perempuan, sehingga perempuan bisa membuktikan bahwa mereka juga mampu dan layak berada di dunia politik

⁷² Hasil Wawancara Dengan Ibu Jumiaty (Masyarakat Jeunib). 16 Februari 2021.

Perempuan juga memiliki peran penting di dalam kehidupan. Hadirnya peran perempuan di dalam dunia politik dinilai sebagai bentuk dari adanya kesetaraan gender dan bukan sebagai pelengkap saja.

Kepercayaan yang diberikan oleh sesama perempuan bisa menimbulkan kepercayaan diri perempuan dan itu menjadi satu dorongan kuat bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam politik. Seperti yang kita ketahui bahwa bagi perempuan untuk terjun ke perpolitikan bukan suatu hal yang mudah mengingat banyaknya pesaing laki-laki serta kurangnya dukungan dari sesama perempuan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lainnya yaitu:

*“sebagai perempuan, penting adanya kesetaraan gender dan kedudukan kita bisa sama dengan laki laki, dalam lingkungan sekitar pun tidak ada perbedaan perlakuan antara saya dan suami, kalau ada perempuan yang ikut berpartisipasi dalam politik pasti saya akan memilih perempuan kan sesama perempuan mendukung perempuan, kalau kita mau dan mampu serta diizinkan oleh suami kita perempuan bisa juga seperti lelaki”.*⁷³

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan hal yang penting. Jika laki-laki bisa berpartisipasi ke dunia politik, maka perempuan pun bisa untuk ikut serta berpolitik. Hal ini karena perempuan juga memiliki kemampuan yang sama seperti laki-laki.

Menurut bu Asma yang merupakan salah satu narasumber berpendapat bahwa:

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurmia (Masyarakat Jeumpa). 16 Januari 2022.

*“Menurut saya sama antara laki laki dan perempuan dan adanya kesetaraan penting, tapi kalau kedudukan lebih tinggi laki laki dari perempuan tapi kalau dalam mencari nafkah sama, namun dalam lingkungan tidak ada perilaku yg berbeda. Perempuan terjun dalam politik bisa-bisa saja itu tergantung kemauan pribadinya, perempuan juga boleh memimpin asalkan dia mampu. Dan tidak masuk akal jika perempuan hanya duduk di rumah, perempuan juga bisa bekerja yang penting suami dan anak serta urusan rumah terjaga, saya memilih irt karna saya memilih untuk menjaga anak, kalau nanti saya bekerja itu tidak ada larangan dari suami”.*⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan kesetaraan merupakan hal yang penting. Namun, secara kedudukan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan terjun dalam dunia politik merupakan suatu hal yang wajar sesuai dengan keinginan pribadi tanpa adanya larangan dari pihak-pihak tertentu. Seperti mencalonkan diri sebagai orang yang berkuasa atau memiliki kekuatan serta kepemimpinan boleh saja dirasakan oleh perempuan. Tidak ada salahnya dengan hal tersebut selagi perempuan mampu untuk menjalankannya. Menempatkan perempuan hanya di rumah merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena sejatinya manusia butuh adanya kebebasan.

Menurut narasumber lainnya :

*“Dalam bermasyarakat memang penting itu kesetaraan, tidak boleh berbeda-beda karena kita sama manusia. Baik laki-laki atau perempuan sama saja, dalam pekerjaan juga begitu. Suami bekerja, kita juga bisa bekerja. Kalau saya pribadi bekerja dagang kecil-kecilan, buat bantu-bantu sedikit. Suami pun dukung karena memang ini di lingkungan rumah. Perempuan masuk ke politik tidak masalah, itu kan hal wajar juga. Saya pun mendukung kalau memang ada yang terjun ke politik.”*⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Asma (Masyarakat Jeumpa). 17 Februari 2021.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Maryana (Masyarakat Kecamatan Jeumpa). 16 Januari 2022.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam bermasyarakat kesetaraan itu penting dan tidak boleh membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai sesama manusia. Perempuan mampu untuk bekerja sama seperti laki-laki. Seperti dalam politik, keikutsertaan perempuan dalam politik sebagai sesuatu yang wajar.

Dukungan bagi perempuan yang ikut berpartisipasi ke dalam dunia politik merupakan bentuk dari adanya kesetaraan serta kepercayaan dari masyarakat terhadap perempuan. Dukungan seperti ini memang sudah sepatutnya ada untuk memberikan kepercayaan diri bagi perempuan, terutama dukungan sesama perempuan. Tanggapan bahwa kesetaraan itu perlu juga dituturkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

*“Kesetaraan itu perlu antara kita sama orang laki tapi kalau kedudukan laki-laki lebih tinggi dan perempuan ada di bawah. Namun kalau ada perempuan terjun ke politik boleh asal dia mampu dan punya integritas ya tidak masalah. Perempuan juga wajib bekerja tidak bisa duduk diam saja, sekarang sama sama kedudukannya kalau dalam bekerja tapi juga kalau ada izin suami. Saya sendiri pun bekerja sebagai pedagang untuk membantu suami dan suami pun tidak melarang saya bekerja”.*⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesetaraan dan kedudukan merupakan suatu hal yang berbeda. Perbedaan kedudukan bukanlah menjadi suatu masalah bagi perempuan yang ingin terjun ke ranah politik, karena pada dasarnya dalam pekerjaan kedudukan perempuan sama saja dengan lelaki.

Sebagai perempuan tidak bisa hanya duduk berdiam di rumah. Dengan kata lain jika perempuan yang ingin terjun ke dalam perpolitik itu bukanlah suatu masalah

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Suryani (Masyarakat Kecamatan Jeumpa). 17 Februari 2021.

selagi perempuan itu mampu dan memiliki integritas dalam dirinya. Akan tetapi, sebelum mengambil suatu keputusan perempuan harus mendapat izin terlebih dahulu. Izin suami sangatlah penting dalam hubungan rumah tangga.

Stigma masyarakat yang terbentuk memberikan pandangan buruk terhadap perempuan. Perempuan dinilai seakan-akan hanya makhluk manja yang hanya bisa mengandalkan laki-laki saja, padahal perempuan juga mampu bekerja sama seperti laki-laki.

“kita bisa kerja sendiri tidak mengandalkan orang laki terus. Kita harus sama-sama kerja jangan hanya perempuan yg kerja atau bukan laki-laki saja yg kerja dan penting adanya kesetaraan. Kita bisa adanya kesetaraan saling bantu membantu, perlakuan di rumah harus beda namun di luar rumah harus sama kerjasama. Tanggapan saya bisa perempuan terjun ke dalam politik dari pandangan pribadi, jika ada kandidat perempuan dan laki laki saya akan memilih laki laki karena lebih kuat. Perempuan tidak bekerja tidak setuju, ibu rumah tangga sebagai pilihan dan tidak melarang saya bekerja”⁷⁷.

Ibu Rosmiati yang merupakan salah satu narasumber membantah hal tersebut, perempuan bisa melakukan pekerjaannya sendiri tanpa mengandalkan laki-laki. Dalam urusan pekerjaan siapa saja bisa tidak hanya melihat dari satu gender saja. Namun berbeda dengan urusan kepemimpinan, laki-lakilah yang dianggap lebih layak mengingat dari berbagai sisi bahwa laki-laki jauh lebih kuat.

Selanjutnya dijelaskan oleh ibu Ida bahwa bentuk kesetaraan bagi perempuan adalah mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki.

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rosmiati (Masyarakat Kecamatan Jeunib). 16 Januari 2022.

“Kesetaraan itu penting, saya melihat kesetaraan itu dari segi pendidikan. Menurut saya pendidikan wajib didapatkan oleh perempuan dan laki-laki karena pendidikan merupakan hak bagi setiap masyarakat. Seorang perempuan kelak jika memang dia tidak diizinkan oleh suaminya untuk bekerja, seorang perempuan tetap harus menjadi madrasah pertama bagi anaknya sehingga ia haruslah berpendidikan tinggi agar melahirkan bijeh yang geut (anak yang baik)”.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kesetaraan merupakan adanya kesamaan hak dalam mendapatkan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Pendidikan merupakan hal wajib yang boleh ditempuh oleh siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, pendidikan tidak melihat pada siapa mereka dan apa jenis kelamin mereka. Karena pendidikan tidak semata hanya untuk memperoleh pekerjaan semata tetapi pendidikan berguna di dalam segala aspek. Contohnya seorang ibu yang berpendidikan tinggi mampu melahirkan anak-anak yang cerdas, karena nantinya ibu lah yang menjadi madrasah pertama bagi anaknya.

Pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Keluarga yang berwawasan gender tidak akan menjadikan gender sebagai penghalang ruang gerak pengembangan potensi seorang anak, bahkan keluarga tersebut akan selalu mendukung pengembangan potensi anak asalkan tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat.⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ida (Masyarakat Kecamatan Jeumpa). 17 Februari 2021.

⁷⁹ Dede Nurul Qomariah. Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Jurnal Cendekiawan Ilmiah. 2019. Vol, 4. No. 2. Hal. 55.

Ibu Ida juga menambahkan bahwa ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan di masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Perlakuan di masyarakat tentu ada. Di perkampungan atau desa perempuan tidak boleh sembarangan bisa duduk atau nongkrong di warung-warung kopi. Karena itu nanti bisa menimbulkan anggapan buruk masyarakat. Kalau di perkotaan, perempuan mau duduk di cafe tidak masalah tidak ada larangan. Menurut saya pribadi boleh saja duduk ngopi di cafe atau warung kopi asalkan tidak melanggar syariat Islam.”⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan berbeda. laki-laki dinilai bisa leluasa untuk duduk di warung kopi sedangkan perempuan tidak bisa sembarangan. Sedangkan menurut narasumber hal tersebut boleh saja asalkan tidak melanggar syariat Islam.

Ketidakleluasaan bagi perempuan untuk memasuki wilayah cafe atau warung kopi muncul akibat adanya paradigma masyarakat yang menilai bahwa warung kopi sejatinya tempat bagi laki-laki dan hadirnya perempuan di wilayah tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan nilai atau norma di masyarakat. Sehingga hal ini memunculkan pembatasan ruang gerak bagi perempuan. Menurut narasumber lainnya bahwa:

“Gender kan berbicara tentang kesetaraan, kalau kita bicara kesetaraan kan tentu ada dan itu perlu bagi kita. Sebenarnya sama saja kedudukan kita sebagai manusia ini, yang membedakan itu kan dari status sosial saja ada yang kaya ada yang miskin. Tapi kalau dari pandangan Allah kita tidak beda kecuali tingkat keimanan kita. Tanggapan saya ya kalau ada perempuan berpartisipasi ke politik tidak masalah dan saya dukung, karena melihat pada kesetaraan yang dijelaskan tadi. Mau bekerja sebagai apapun perempuan tidak ada masalah asal tidak ada unsur yang dilarang sama Allah.”⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ida (Masyarakat Kecamatan Jeumpa). 17 Februari 2022.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ati (Warga Kecamatan Jeumpa) 16 Januari 2022.

Dari data wawancara di atas menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah adalah sama dan yang membedakan hanyalah tingkat keimanannya saja. Adanya kesetaraan antara lelaki dan perempuan dibuktikan dengan adanya dukungan beliau terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam dunia perpolitikan.

Dari hasil keseluruhan data wawancara di atas yang telah peneliti kelompokkan. Pada kelompok pertama, perempuan Aceh di Kabupaten Bireuen secara garis besar berpendapat bahwasanya kesetaraan gender itu tidak ada antara perempuan dan laki-laki dan perempuan dinilai memiliki derajat yang berada dibawah laki-laki.

Dalam kelompok ini terdapat pemarginalan yang dibentuk oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan baik dalam hal pekerjaan maupun pada hal lainnya. Seperti, tidak diperbolehkannya perempuan untuk terjun pada ranah politik. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam hal tersebut.

Ketidakadilan terus menghantui perempuan, pemikiran tidak adanya kesetaraan bagi perempuan ternyata dilahirkan oleh perempuan itu sendiri. perempuan dianggap hanya sebagai seseorang yang penempatannya berada pada posisi kedua setelah laki-laki. Lahirnya pemikiran seperti ini tentu sangat merugikan sesama perempuan. Seharusnya, sebagai sesama perempuan, sudah sepatutnya untuk

saling mendukung, baik pada ruang lingkup keluarga, masyarakat dan maupun area publik.

Berbeda dengan kelompok pertama, pada kelompok kedua mereka menyadari bahwa penting sekali adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Adanya kesetaraan gender memberikan kebebasan bagi mereka, baik kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, serta kebebasan dalam menentukan pekerjaan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Pada dasarnya baik perempuan dan laki-laki itu sama dan yang membedakan hanyalah jenis kelamin.

Dalam kelompok kedua ini beberapa perempuan memberikan dukungan terhadap sesama perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa antara sesama perempuan masih memiliki kepercayaan. Kepercayaan tersebut berupa memberikan hak suara atau hak pilih mereka kepada perempuan yang ikut berpartisipasi dalam perpolitikan.

Masih adanya kepercayaan terhadap sesama perempuan merupakan suatu hal yang dinilai cukup bagus. Karena hal ini berdampak baik pada perempuan yang ingin bergabung pada ranah politik.

Adapun beberapa perempuan yang terjun dalam politik yaitu Salwa Hanum sebagai perwakilan dari Partai Aceh, Aida Fitria dari partai Nanggroe Aceh dan Rosmani dari Partai Golongan Karya. Ketiga perempuan ini terpilih dan mampu mendapatkan kursi di DPRK Bireuen pada periode 2019-2024. Salwa Hanum juga mendapatkan kursi di DPRK Bireuen pada periode sebelumnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya patriarki menjadi salah satu faktor utama yang memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya pandangan sebagian perempuan Aceh khususnya Kabupaten Bireuen terhadap konser gender.

4.4 Faktor yang membentuk perspektif perempuan Aceh

Ada beberapa perspektif yang terbentuk di masyarakat Aceh, adanya perspektif yang terbentuk dalam masyarakat Aceh memiliki beberapa faktor. Adapun faktor tersebut adalah faktor agama faktor budaya patriarki, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial politik.

4.3.1 Faktor Agama

Di Kabupaten Bireuen, faktor yang menjadi pembentuk perspektif perempuan Aceh salah satunya yaitu faktor agama. Seperti yang kita ketahui bahwa Aceh dikenal sebagai daerah yang didominasi oleh pemeluk agama islam dan sangat menjunjung tinggi nilai Keislaman. Maka tak heran jika masyarakat Aceh menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, agama menjadi pedoman dalam kehidupan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, terdapat beberapa pendapat mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki. Salah satu pendapat tersebut yaitu:

*“... dalam agama kedudukan laki-laki jelas berbeda, laki-laki kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perempuan”.*⁸²

Dari hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa di dalam agama posisi perempuan tidak sama dengan laki-laki karena kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki.

⁸² Hasil Wawancara Dengan Ibu Mita (Masyarakat Jeunib) 15 Januari 2022.

Pada dasarnya penempatan posisi perempuan oleh agama Islam pada harkat, martabat dan derajat memiliki kesetaraan atau ada pada tingkatan yang sama.⁸³ Kedudukan perempuan dalam agama Islam sejajar dengan laki-laki, Allah telah menciptakan perempuan dan laki-laki dengan bentuk terbaik dengan kedudukan yang paling hormat. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

*“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lain, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang bertaqwa”. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*⁸⁴

Dari penjelasan Al-quran tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan baik dalam hal beribadah maupun dalam aktivitas sosial yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan.⁸⁵

Dalam kehidupan sosial masih saja ada yang membeda-bedakan. Ketidakadilan terhadap perempuan muncul dengan membawa paham agama disebabkan karena adanya pemaknaan masyarakat yang salah dalam memaknai hal tersebut yang disebabkan oleh faktor pengaruh sejarah, lingkungan budaya dan tradisi patriarki yang ada di masyarakat.

Tabel 4.1

⁸³ Muhammad Quraish Shihab. 1995. *Membumikan Alquran*. Cet. 1. Mizan. Bandung. Hal. 272-278.

⁸⁴ Al-Qura'an, 49:13.

⁸⁵ Sarifah Suhra. 2013. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qura'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*. Jurnal Al-Ulum. IAIN Gorontalo. Vol. 13. No. 2. Hal. 374.

Kecamatan/ <i>Sub District</i>		Jumlah Penduduk/ <i>Population</i>	Jumlah Penduduk Menurut Agama				
			Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Samalanga	31 658	31 647	2	-	-	9
2	Simpang Mamplam	29 131	29 130	1	-	-	-
3	Pandrah	8 058	8 050	8	-	-	-
4	Jeunieb	27 187	27 187	-	-	-	-
5	Peulimbang	11 573	11 571	-	-	-	2
6	Peudada	26 753	26 750	2	1	-	-
7	Juli	33 392	33 362	23	3	-	4
8	Jeumpa	37 489	37 489	-	-	-	-
9	Kota Juang	47 943	47 188	285	19	35	416
10	Kuala	17 838	17 838	-	-	-	-
11	Jangka	26 911	26 911	-	-	-	-
12	Peusangan	52 631	52 519	-	-	-	112
13	Peusangan Slt	14 708	14 708	-	-	-	-
14	Peusangan Sb Krueng	12 046	12 046	-	-	-	-
15	Makmur	14 924	14 924	-	-	-	-
16	Gandapura	21 555	21 543	1	-	-	11
17	Kuta Blang	21 503	21 503	-	-	-	-
Jumlah/ <i>Total</i>		435 300	434 366	322	23	35	554
Tahun 2014		423 397	422 460	327	19	37	554
Tahun 2013		413 817	412 913	316	13	35	540
Tahun 2012		406 083	405 224	290	12	39	518
Sumber : Dinas Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bireuen							

Dari tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa Islam sebagai agama dengan pemeluk terbanyak yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bireuen. Selain agama Islam ada beberapa agama lain yang ada di Kabupaten Bireuen yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan juga Budha.

4.3.2 Faktor Pendidikan

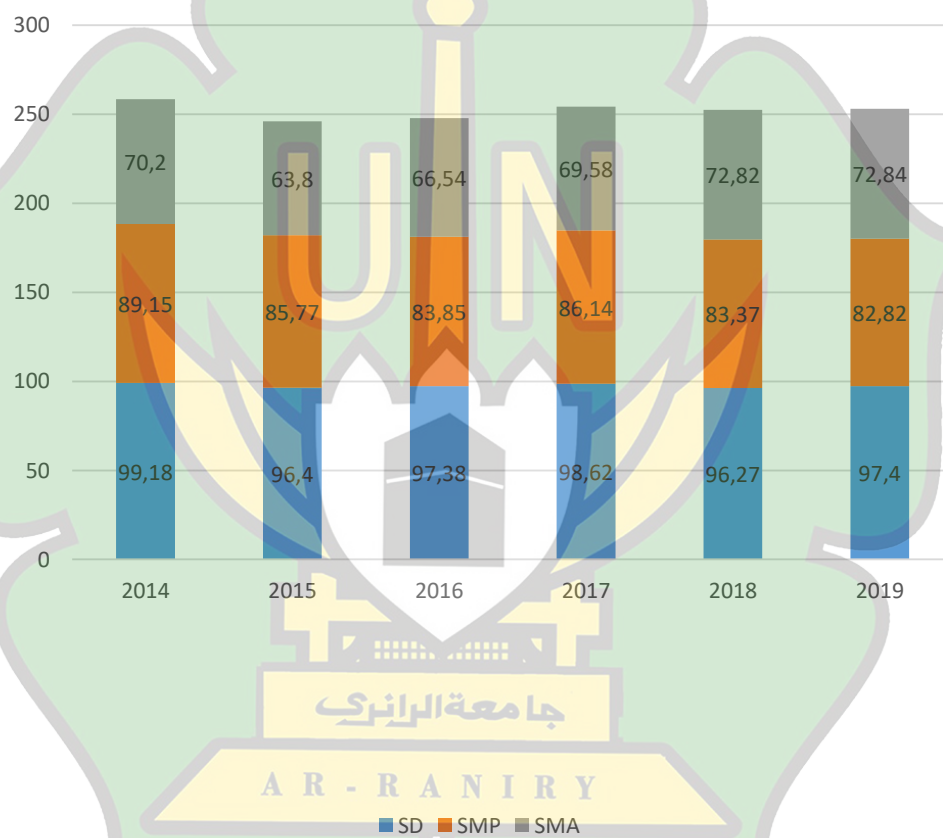
Pendidikan merupakan hal penting dalam kemajuan suatu daerah, adanya pendidikan mampu mengubah pola pikir atau pandangan masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi dengan pengetahuan yang didapatkan. Di Kabupaten Bireuen Pendidikan menjadi salah satu faktor yang membentuk pola pikir seseorang terhadap gender maupun paham feminisme.

Rata-rata narasumber yang memiliki latar belakang pendidikannya yang lebih tinggi setuju bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama dan memiliki hak-hak yang sama. Secara keseluruhan, pada Kabupaten Bireuen mengalami kenaikan dan juga penurunan pada tingkat partisipasi murni tahun 2014-2019. Seperti yang ditampilkan pada bagan di bawah.

Bagan 4.1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen
Tahun 2014-2019



Pada bagan sebelumnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2019 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bireun mengalami ketidakstabilan pada jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA.

Gambar 4.2

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen

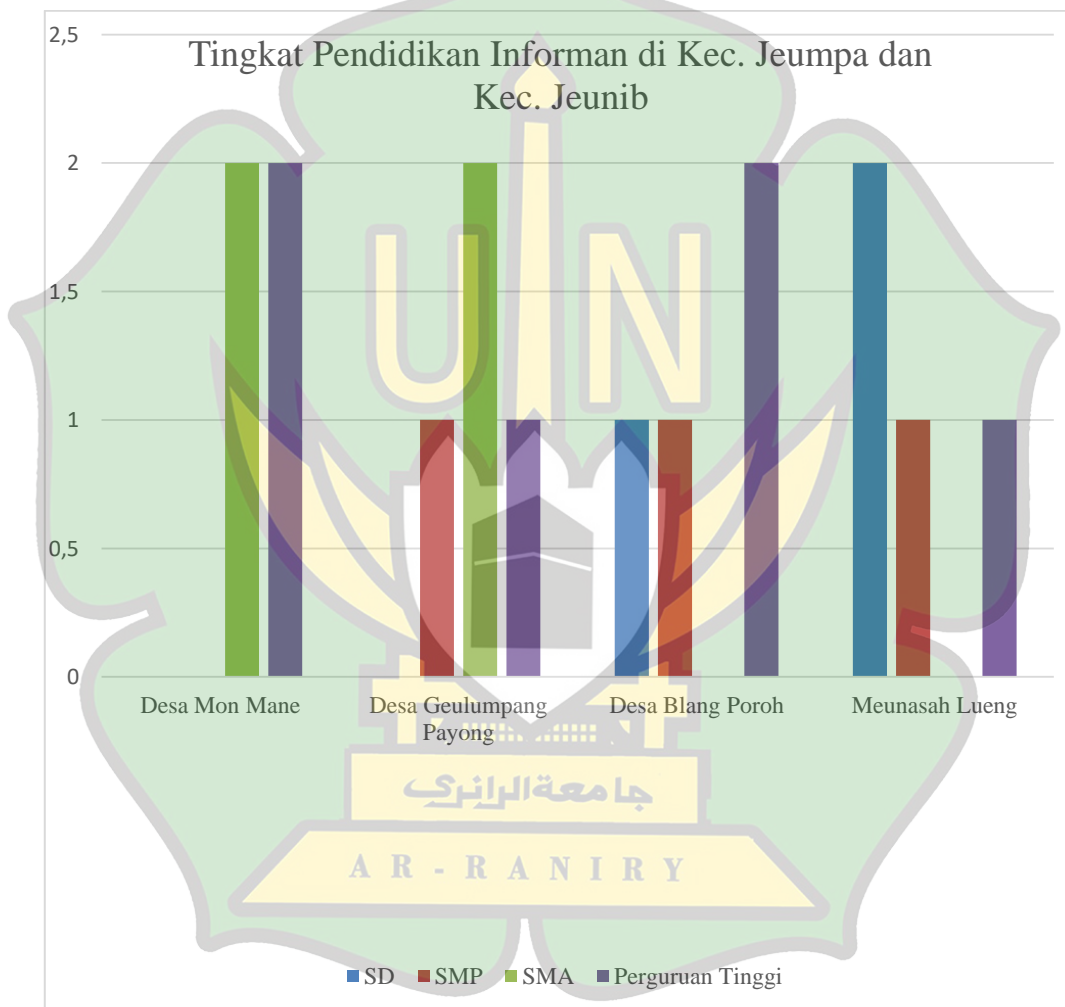
Jenjang Pendidikan	2013*	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belum/Tdk Tamat SD	18,36	16,28	7,98	7,35	9,61
SD Sederajat	29,89	29,15	24,57	31,74	30,31
SLTP Sederajat	22,11	21,91	29,61	19,59	23,72
SLTA Sederajat	23,36	24,77	27,23	29,73	26,36
Diploma I/II/III	2,33	3,32	3,68	2,86	2,83
Diploma IV/S1	3,92	4,46	6,75	8,50	7,09
S2/S3	0,02	0,11	0,19	0,22	0,09
SLTP +	51,74	54,57	67,46	60,90	60,08

Dari data di atas dapat dilihat pada tingkat bahwa adanya penurunan persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah diharapkan segera

mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk meningkatkan kembali partisipasi dalam pendidikan.

Bagan 4.2

Hasil Penelitian Dengan Narasumber



Dari data di atas yang menunjukkan tingkat pendidikan pada narasumber, menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat terhadap suatu hal.

Hal ini termasuk pula dalam membentuk pemaknaan berbeda dari setiap individu masyarakat dalam pemaknaan konsep gender. Suatu pendapat dari salah seorang narasumber yang setuju dengan kesetaraan, ia menjelaskan bahwa perempuan tugasnya tidak hanya duduk di rumah saja sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga).

Adapun hasil dari wawancara dengan salah satu narasumber yaitu:

*“..... kesetaraan itu penting dan Perempuan boleh melakukan apa yang dia inginkan seperti bekerja di luar rumah, memilih menjadi ibu rumah tangga, wanita karir atau bahkan keduanya”.*⁸⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa perempuan bisa memilih pekerjaan untuk dirinya sendiri, baik sebagai ibu rumah tangga, wanita karir atau bahkan keduanya. Perempuan terutama yang sudah menjadi ibu merupakan sosok yang tangguh yang bisa melakukan berbagai jenis pekerjaan sekaligus.

4.3.3 Faktor Ekonomi

Kabupaten Bireuen mengalami ketidakstabilan perekonomian yang kemudian memunculkan berbagai upaya-upaya pemerintah. Salah satu bentuk upaya tersebut

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurmia (Warga Kecamatan Jeumpa). 16 Januari 2022.

adalah pengembangan dari sektor pertanian yang mendapatkan dukungan dari Nova Iriansyah yang saat itu menjabat sebagai Plt Gubernur Provinsi Aceh⁸⁷.

Dilihat dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen, pemerintah masih belum mampu menekan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah yang menunjukkan adanya peningkatan pada angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen yang semula di angka 1,77% menjadi 1,95%.

Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang membentuk perspektif gender perempuan Aceh di Kabupaten Bireuen. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tingginya perekonomian masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi pula pendidikan yang diraih oleh masyarakat tersebut, maka akan semakin bagus pola pikir atau cara pandang mereka terhadap sesuatu. Sebaliknya, semakin rendahnya perekonomian masyarakat, semakin sulit pula masyarakat dalam mendapatkan pendidikan.

Tabel 4.2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen

Bireuen	Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	
	2019	2020

⁸⁷ Diskominfo Bireuen. 2020. *Bupati Bireuen Ajak Camat Berinovasi Tingkatkan Perekonomian Masyarakat*. <https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/ekonomi/bupati-bireuen-ajak-camat-berinovasi-tingkatkan-perekonomian-masyarakat> (Diakses November 4, 2021).

	1,77	1,95
--	------	------

Pada tingkat keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan yang semula berada pada angka 0,40% menjadi 0,45%. Seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen

Bireuen	Indeks Keparahhan Kemiskinan P2	
	2019	2020
	0,40	0,45

Pada data hasil dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), memberikan gambaran bahwa perekonomian yang rendah menyebabkan sulitnya seseorang untuk mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4.3.4 Faktor Budaya Patriarki

Di Kabupaten Bireuen, budaya patriarki menjadi salah satu penyebab terbentuknya perspektif perempuan Aceh terhadap konsep gender. Budaya patriarki masih melekat erat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak masyarakat yang memposisikan laki-laki pada posisi utama dan perempuan di posisi kedua.

Budaya patriarki muncul dalam kehidupan masyarakat karena adanya nilai-nilai ketimuran yang mendominasi di masyarakat, nilai ini yang kemudian menjadi suatu nilai yang signifikan dalam politik, sehingga memunculkan perspektif atau pandangan bagi masyarakat bahwa ranah politik merupakan tempat identik dari kekuasaan kaum laki-laki⁸⁸.

Perempuan masih mengalami diskriminasi di masyarakat. contoh dari sikap diskriminasi tersebut berupa anggapan bahwa perempuan memiliki derajat di bawah laki-laki, sehingga hal tersebut menjadi alasan enggan nya perempuan dalam memilih kaumnya yang berpartisipasi ke dalam dunia politik. Anggapan seperti tadi disampaikan oleh salah satu narasumber sebagai berikut:

*“...wajar saja kalau perempuan ikut berpolitik tetapi harus dengan seizin suami dan saya pun tetap tidak memilih perempuan karena memang derajat perempuan di bawah laki-laki”.*⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas, Maka hal ini tidak mengherankan jika persentase keterlibatan perempuan Kabupaten Bireuen di parlemen masih tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain seperti Aceh Tamiang, Simeulu, Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh selatan.

Tabel 4.4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen

	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)

⁸⁸ Rasyidin. Politik Gender Aceh: Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki. Unimal Press: Keude Aceh. Lhokseumawe. Hal. 85.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nilawati (Warga Kec. Jeunib). 16 Februari 2021.

Kabupaten/Kota	2019	2020
Aceh Tamiang	37	37
Simeulu	20	20
Pidie	18	18
Nagan Raya	16	16
Aceh Tengah	13	17
Aceh Singkil	12	12
Aceh Tenggara	10	10
Aceh Selatan	10	10
Bireuen	8	8

Perempuan mengalami beberapa hambatan akibat adanya budaya patriarki terutama pada bidang politik. Sejatinya di dalam perpolitikan perlu adanya keikutsertaan perempuan untuk menjadi perwakilan kaum perempuan. Sehingga, jika ada kebijakan yang dirasa mendiskriminasi atau merugikan perempuan, perwakilan perempuan yang berada di pemerintahan tersebut bisa menyuarakan hal tersebut secara langsung agar diskriminasi tidak terjadi.

4.3.5 Faktor Sosial Politik

Kebijakan politik yang diciptakan oleh pemerintah memiliki pengaruh terhadap terbentuknya pola pikir atau perspektif masyarakat terhadap suatu hal. Di Kabupaten Bireuen, terdapat kebijakan yang dinilai kontra terhadap perempuan. Melalui surat edaran tentang standarisasi warung kopi, *cafe*, dan restoran sesuai syariat islam, pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan kebijakan berupa pelarangan bagi pelayan atau pramusaji untuk melayani pembeli berjenis kelamin perempuan di atas pukul 21.00 WIB. Selain itu, bagi perempuan dan laki-laki bukan muhrim tidak dibolehkan duduk dalam satu meja kecuali mereka memiliki hubungan darah atau mahramnya. Hal ini dinilai sebagai bentuk dari diskriminasi yang membatasi ruang gerak perempuan di wilayah tersebut.⁹⁰

Kebijakan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki ruang gerak atau kebebasan dalam dirinya walaupun itu termasuk hal-hal kecil seperti yang telah jelaskan di atas.

Padahal baik lelaki maupun perempuan sama-sama memiliki hak dalam kebebasan ruang gerak. Adanya kebijakan yang mendiskriminasi terhadap perempuan, secara tidak langsung membentuk perspektif masyarakat bahwa benar seharusnya tempat perempuan berada di rumah. Sedangkan laki-laki dapat leluasa berada di ruang publik tersebut.

⁹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180905194627-20-327987/bireuen-aceh-larang-non-muhrim-duduk-siemeja-di-kedai-kopi> (Diakses November 4, 2021).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

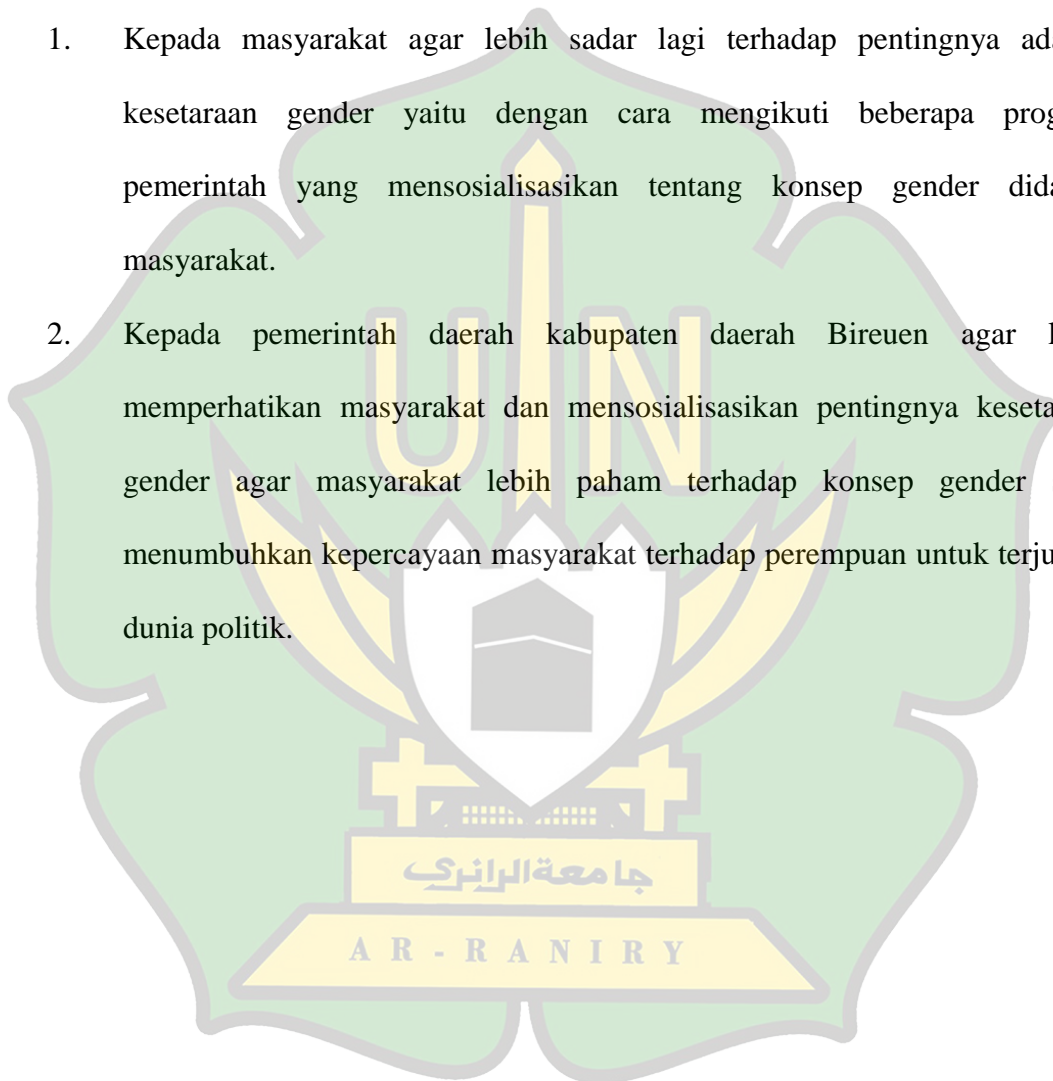
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai konsep gender dalam perspektif gender dan faktor yang menjadi penyebab terbentuknya perspektif tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep gender dalam perspektif perempuan Aceh memiliki beberapa pandangan yang berbeda dalam memaknai konsep gender. Pandangan pertama, bahwa adanya kesetaraan gender merupakan sesuatu hal yang penting terutama dalam halnya pekerjaan. Pada pandangan kedua, bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak sama seperti yang dijelaskan dalam Alquran yang bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan merupakan seorang pemimpin.
2. Seorang pemimpin sebaiknya merupakan seorang laki-laki dimana sesuai dengan ajaran agama yang mengatakan bahwa laki-laki merupakan seorang pemimpin. Banyak faktor yang mempengaruhi perspektif perempuan Aceh sehingga laki-laki dan perempuan tidak memiliki kesetaraan namun tidak dalam beberapa urusan. Adapun faktor yang mempengaruhi terbentuknya perspektif gender adalah faktor agama, faktor budaya patriarki dan faktor pendidikan.

5.2 Saran

Adapun dari penelitian ini peneliti dapat memberikan masukan terhadap penelitian selanjutnya dan pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar lebih sadar lagi terhadap pentingnya adanya kesetaraan gender yaitu dengan cara mengikuti beberapa program pemerintah yang mensosialisasikan tentang konsep gender didalam masyarakat.
2. Kepada pemerintah daerah kabupaten daerah Bireuen agar lebih memperhatikan masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya kesetaraan gender agar masyarakat lebih paham terhadap konsep gender serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk terjun ke dunia politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan zainal azikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Grub. Jakarta. 2007.
- Herry Agus Susanto. *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*. 2015.
- Iwan Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran Kuningan. Kuningan. 2019.
- Jacqueline Aquino Siapno. 2002. *Gender, Islam, Nasionalism and The State in Aceh*. Routledge Curzon 11 New Fetter Lane. London.
- James T. Siegel. 1969. *The Rope of God*. University of California Press, Ltd. London.
- Laura. J. Shepherd. 2010. *Gender Mattern in Global Politics*. Roudledge. New York.
- Kementrian Pemberdaya Perempuan RI. *Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Agama Islam*,(Jakarta. UNFPA, 2004).
- Mustaghfiroh Rahayu. 2013. *Reading on Acehnese Woman in The Age of Sharia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Noeng Mu'hadjir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Rakesarasin. Yogyakarta. 1996.
- Paham Ginting dan Syafrizal Helmi Situmorang. 2008. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*. USU Press. Medan.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2009.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. PT. Bumi Aksara: Jakarta. 2008. Hal.53.
- Vicky dan Georgina. *Gender, Politic and The State*. Routledge 11 New Fetter Lane. London. 1998. Hal. 1.

- Ade dan Dessy. *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*. Universitas Padjajaran. Bandung. Jurnal Sosial. Vol.7. No. 1. Hal.72.
- Ahmad, K.B. 2015. *Perempuan Aceh dalam Perspektif Antropologi. Gender Equality*. Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1. No. 2.
- Ardi Adji. Integritas Sosial Ekonomi di Aceh: Sebelum dan Sesudah Tsunami. Widyariset.Vol. 14. No. 1. 2011.
- Arnild Augina Mekarisce. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Universitas Jambi. 2020. Hal.147.
- Dede Nurul Qomariah. Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Jurnal Cendekiawan Ilmiah. 2019. Vol, 4. No. 2. Hal. 55.
- Desi Purnama sari. Gender Dalam Perspektif Ulama di Aceh (Studi kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Al-Murshalah. Vol.2. No. 1. 2006. Hal. 56-61.
- Hielda Octaviani. *Tipologi Masyarakat Aceh pada perang Aceh-Belanda 1873-1942*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry: Banda Aceh. 2020. Hal.26.
- Iryana dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam.
- Kasmawati. 2013. Gender Dalam Perspektif Islam. UIN Alauddin. Vol. 1. No. 1. Hal. 59-61.
- Mustika dan Siti. Implementasi Perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Provinsi Aceh. Universitas Brawijaya. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis. 2018. Vol. 2. No.2. Hal. 74
- M.Raharjo. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Nur Aisyah. *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)*. Muwazah. Vol. 5. No. 2. Hal. 206-209.
- Nuril Hidayati. *Teori Feminisme: Sejarah , Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri: Kediri. Hal.23.

R.w. Connell. *New Direction In Gender Theory Masculinity Research, and Gender Politics*. Journal of Anthropologi. University of Sidney: Australia. Vol. 61:3-4. 1996. Hal. 159.

Syahrul Amar. *Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX*. Universitas Hamzawadi. Vol.1. No.2. 2017. Hal. 106-111.

Akhmadi. (2015). *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur)*.

Al-Qur'an surah Al-Hujarat: 13.

Bps Kabupaten Bireuen. 2014

Diskominfo Bireuen. 2020. *Bupati Bireuen Ajak Camat Berinovasi Tingkatkan Perekonomian Masyarakat*.

<https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/ekonomi/bupati-bireuen-ajak-camat-berinovasi-tingkatkan-perekonomian-masyarakat> (Diakses November 4, 2021).

<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/19/plt-gubernur-lantik-muzakkar-jadi-bupati-bireuen>. (Diakses 4 Januari 2022)

<https://realitasonline.id/aceh/muzakkar-a-gani-dilantik-sebagai-bupati-bireuen-sisa-masa-jabatan-2017-2022> (Diakses 4 Januari 2021).

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021011220-532-597396/fakta-aceh-juara-provinsi-termiskin>. (Diakses 20-12-2021).

<http://www.bps.go.id/indicator/40/464/2keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>. (Diakses 4 Januari 2022).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180905194627-20-327987/bireuen-aceh-larang-non-muhrim-duduk-siemeja-di-kedai-kopi> (Diakses November 4, 2021).

Hasil Wawancara Dengan Asma (Masyarakat Jeumpa). 17 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Erli Hasnita (Warga Jeunib). 16 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Fitria (Masyarakat Jeunib). 16 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Ida (Masyarakat Jeumpa). 17 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Jumiati (Masyarakat Jeunib). 16 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Kasmin (Masyarakat Jeumpa). 17 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Nilawati (Warga Jeunib). 16 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Nurul (Masyarakat Jeunib). 16 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Siti Sri Dewi (Warga Jeumpa). 17 Februari 2021

Hasil Wawancara Dengan Sugiarti (masyarakat Jeunib). 16 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Surya Nola (Masyarakat Jeunib). 16 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Suryani (Masyarakat Jeumpa). 17 Februari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Yuli (Masyarakat Jeumpa). 17 Februari 2021



Lampiran A INSTRUMEN PENELITIAN

Identitas Peneliti

Nama : Maghfirah Alwi

Umur : 23

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan Terakhir: SMA Negeri 2 Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Lampulo, Banda Aceh

INSTRUMEN PENELITIAN

Judul Skripsi “**Konsep Gender Dalam Perspektif Perempuan Aceh (Studi Kasus Kabupaten Bireuen)**”. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ibu terhadap gender?
2. Menurut ibu apakah penting adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan?
3. Apakah menurut ibu kedudukan lelaki dan perempuan bisa setara?
4. Menurut ibu apakah ada perbedaan perlakuan antara ibu dan suami dalam rumah tangga maupun di lingkungan sekitar?
5. Apa tanggapan ibu mengenai perempuan yang ikut serta dalam dunia politik?
6. Bagaimana tanggapan ibu tentang kepemimpinan perempuan?
7. Apa tanggapan ibu mengenai pendapat orang bahwa perempuan tidak perlu bekerja dan hanya cukup menjadi ibu rumah tangga?
8. Pernah tidak ibu berpikir, kenapa perempuan tidak bisa seperti laki-laki. Bagaimana tanggapan ibu?
9. Apa yang melatarbelakangi ibu memilih pekerjaan ini?

Lampiran B FOTO DOKUMENTASI

Foto Bersama Narasumber di Kecamatan Jeunib



AR - RANIRY











A R - R A N I R Y



Foto Bersama Narasumber di Kecamatan Jeumpa















Lampiran C Latar Belakang Informan

Desa Blang Poroh, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen

1. Nama : Sugiarti
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani

2. Nama : Nilawati
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang

3. Nama : Fitria
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Guru

4. Nama : Jumiati
Pendidikan : SD
Pekerjaan : IRT

Desa Meunasah Lueng, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen

1. Nama : Mita
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Bidan

2. Nama : Rosmiati
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani

3. Nama : Maryana
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang

4. Nama : Romawati

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT

Desa Mon Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen

1. Nama : Asma

Pendidikan :S1

Pekerjaan : IRT

2. Nama : Yuli

Pendidikan :SMA

Pekerjaan : Pedagang

3. Nama : Ida

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wanita Karir

4. Nama : Siti Sri Dewi

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Desa Geulumang Payong

1. Nama : Nazariah

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

2. Nama :Marlina

Pendidikan :SMA

Pekerjaan : IRT

3. Nama : Ati

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wanita Karir

4. Nama : Nurmia

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang